

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran umum wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 853,01 km². Kabupaten Lombok Barat beribu kota di Kecamatan Gerung dan memiliki 10 kecamatan dengan kecamatan terbesar adalah Kecamatan Sekotong Tengah dengan luas 330,45 km². Berdasarkan letak administrasi, batas-batas Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

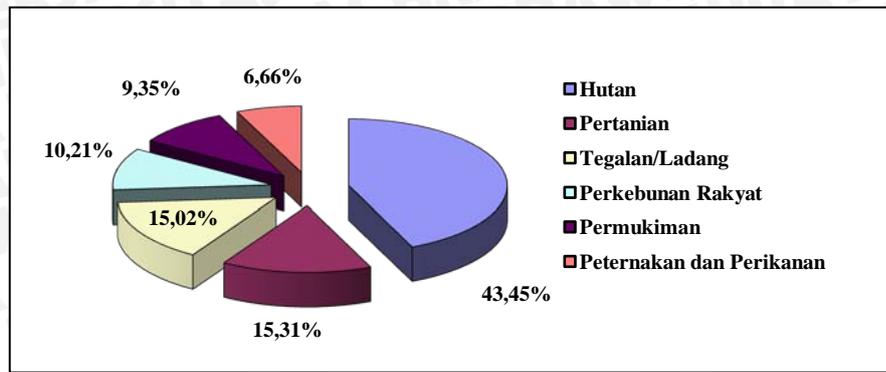
- Sebelah utara : Kabupaten Lombok Utara
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kota Mataram dan Selat Lombok
- Sebelah timur : Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 4. 1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa
1.	Sekotong	330,45	6
2.	Lembar	65,66	5
3.	Gerung	63,61	11
4.	Labuapi	29,64	10
5.	Kediri	25,74	8
6.	Kuripan	23,56	4
7.	Narmada	108,62	16
8.	Lingsar	97,58	10
9.	Gunungsari	90,74	12
10.	Batu Layar	36,63	6
Jumlah		853,01	88

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2010

Struktur penggunaan lahan secara umum Kabupaten Lombok Barat terdiri dari hutan, permukiman, pertanian, tegalan/ ladang, perkebunan rakyat, serta peternakan dan perikanan. Secara keseluruhan Kabupaten Lombok Barat didominasi oleh hutan dengan luas 373,25 km² dari keseluruhan wilayah. Kemudian disusul oleh pertanian seluas 134,09 km², tegalan/ladang seluas 129,57 km², perkebunan rakyat seluas 89,04 km², permukiman seluas 81,62 km², sisanya adalah peternakan dan perikanan seluas 57,46 km². Untuk lebih jelasnya persentase penggunaan lahan dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4. 1 Persentase Tata Guna Lahan Kabupaten Lombok Barat

Sesuai dengan topografinya Kabupaten Lombok Barat memiliki wilayah bergelombang terdapat banyak perbukitan sebahagian besar berada pada ketinggian 0 m – 1300 m diatas permukaan laut dengan curah hujan tergolong rendah (rata rata curah hujan/bulan 19,1 hingga 334,8 mm dan rata hari hujan 110h/tahun). Suhu berkisar 25,6°C dan kelembaban udara antara 60% hingga 93,3 %. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya maka tingkat kepadatan penduduk Kabuapten Lombok Barat adalah 947 orang/km², dengan mata pencaharian terbanyak adalah petani dan nelayan.

Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan diklasifikasi kedalam 4 (empat) kelas kemiringan dengan rinciannya tingkat kemiringan 0-2 merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 ha atau 37,33% dari luas Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diikuti tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 ha atau 30,39% dari luas Kabupaten Lombok Barat, tingkat kemiringan lahan >40% seluas 16.883 ha atau 19,79% dari luas Kabupaten Lombok Barat dan terakhir tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 ha atau 12,49 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Barat, wilayah yang berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut mencakup luas sebesar 34.800 ha atau 40,80 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, ketinggian 100-500 meter mencakup luas wilayah sebesar 40.966 ha atau 48,03 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, ketinggian 500-1000 meter dengan luas 8.650 ha atau 10,14% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan ketinggian >1000 meter seluas 885 ha atau 1,04 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Luas hutan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 seluas 37.325,39 Ha, dan berdasarkan fungsi terbagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan taman wisata alam (merupakan bagian hutan konservasi). Hasil produksi hutan di Kabupaten

Lombok Barat pada tahun 2010 dari berbagai jenis kayu yang dihasilkan mencapai 1.870,00 batang dan 1.477,05 m³. Jenis kayu rimba campuran merupakan jenis kayu yang paling banyak dihasilkan mencapai 1.594,00 batang dan 1.399,98 m³.

4.1.2 Gambaran umum wilayah administrasi Kecamatan Sekotong Tengah

Kecamatan Sekotong Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang terletak di sebelah selatan dan memiliki luas wilayah 330,45 km². Secara administrasi wilayah Kecamatan Sekotong Tengah terdiri dari 6 desa. Batas-batas administrasi Kecamatan Sekotong Tengah adalah sebagai berikut:

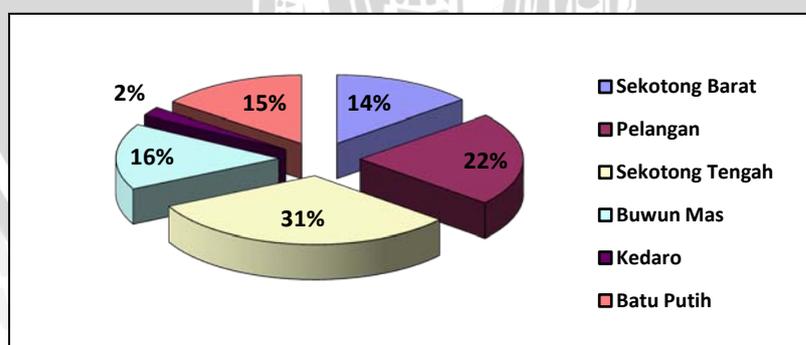
- Sebelah utara : Kecamatan Lembar
- Sebelah selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah barat : Selat Lombok
- Sebelah timur : Kabupaten Lombok Tengah

Kedudukan Kecamatan Sekotong Tengah terhadap Kabupaten Lombok Barat secara administrasi terlihat pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Sekotong Tengah

No.	Desa	Luas Desa (Km ²)	Persentase (%)
1.	Sekotong Barat	46,19	13,98
2.	Pelangan	73,28	22,18
3.	Sekotong Tengah	103,86	31,43
4.	Buwun Mas	51,93	15,71
5.	Kedaro	7,06	2,14
6.	Batu Putih	48,13	14,56
Jumlah		330,45	100

Sumber: Kecamatan Sekotong Tengah Dalam Angka Tahun 2010



Gambar 4. 2 Persentase Luas Desa Kecamatan Sekotong Tengah

Gambar 4. 3 PETA wilayah administrasi kecamatan sekoteng



4.1.3 Kedudukan Kecamatan Sekotong Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Perda Pemprov NTB) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No.11 Tahun 2006, Pulau Lombok diarahkan sebagai pengembangan kawasan pariwisata dengan kegiatan pendukung berupa perkebunan dan agroindustri, dan tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan selain galian C. Selain itu Kecamatan Sekotong Tengah termasuk dalam SSWP I yang diarahkan sebagai kawasan permukiman, kawasan pariwisata dan lindung, serta pengembangan perikanan dan pertanian.

4.1.4 Kondisi sosial kependudukan Kecamatan Sekotong Tengah

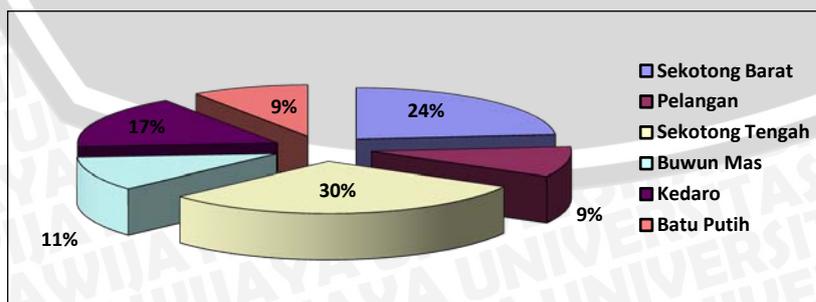
1. Jumlah dan kepadatan penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sekotong Tengah pada tahun 2009 mencapai 51.540 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 156 jiwa/km². Dari 6 Kelurahan di Kecamatan Sekotong Tengah, Desa Sekotong Tengah memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 13.976 jiwa, sedangkan Desa Kedaro memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 4.972 jiwa. Dilihat dari kepadatan penduduk, Desa Kedaro merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan kelurahan yang lain dan Desa Pelangan merupakan area yang memiliki kepadatan penduduk terendah.

Tabel 4. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Sekotong Tengah

No	Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/ Km ²)
1.	Sekotong Barat	32,76	8.310	254
2.	Pelangan	72,03	7.344	102
3.	Sekotong Tengah	42,84	13.976	326
4.	Buwun Mas	91,63	10.443	114
5.	Kedaro	27,63	4.972	180
6.	Batu Putih	63,54	6.495	102
Jumlah		330,45	51.540	156

Sumber: Kecamatan Sekotong Tengah Dalam Angka Tahun 2010



Gambar 4. 4 Persentase Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Sekotong Tengah

2. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur

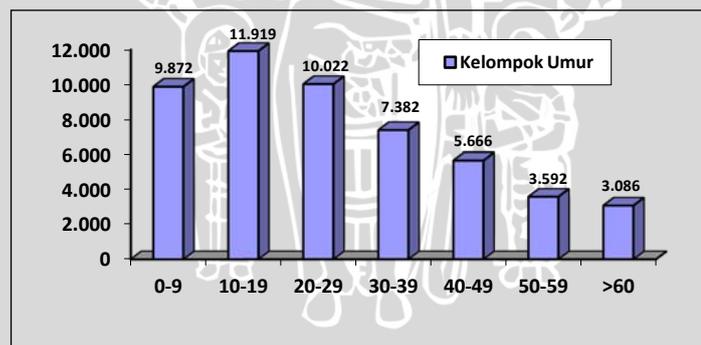
Struktur umur suatu wilayah menunjukkan potensi produktivitas penduduk wilayah tersebut. Sebab dengan mengetahui struktur umur dapat diketahui pula usia produktif maupun usia tidak produktif.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Sekotong Tengah yang terbanyak adalah kelompok umur 10-19 tahun yaitu berjumlah 11.919 jiwa, kemudian diikuti dengan penduduk berusia 20-29 tahun yaitu 10.022 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur 50-59 tahun yaitu 3.086 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa usia produktif di Kecamatan Sekotong sangat tinggi, sehingga diperlukan lapangan kerja yang lebih luas.

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Sekotong Tengah

No	Desa	Struktur Umur (Jiwa)							Jumlah
		0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	
1.	Sekotong Barat	1.592	1.922	1.616	1.190	914	579	498	8.310
2.	Pelangan	1.406	1.699	1.428	1.052	808	512	440	7.344
3.	Sekotong Tengah	2.677	3.232	2.718	2.001	1.536	974	837	13.976
4.	Buwun Mas	2.000	2.414	2.030	1.495	1.148	728	625	10.443
5.	Kedaro	953	1.150	967	713	547	346	297	4.972
6.	Batu Putih	1.244	1.502	1.263	931	713	453	389	6.495
Jumlah		9.872	11.919	10.022	7.382	5.666	3.592	3.086	51540

Sumber: Kecamatan Sekotong Tengah Dalam Angka Tahun 2010



Gambar 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Sekotong Tengah

3. Mata pencaharian penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran kegiatan perekonomian. Mayoritas penduduk Kecamatan Sekotong Tengah memiliki mata pencaharian sebagai petani yaitu sebesar 11.145 jiwa. Jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai buruh paling

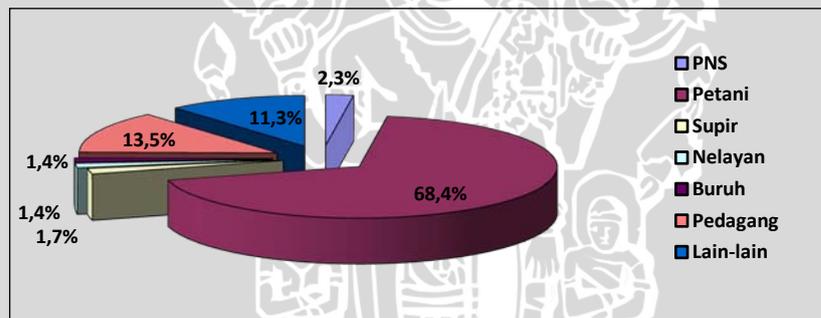
sedikit dibandingkan penduduk yang memiliki mata pencaharian lainnya yaitu hanya sebanyak 223 jiwa atau 1,4% dari total keseluruhan.

Dari data kependudukan didapatkan bahwa mayoritas penduduk pada wilayah perencanaan didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian petani, sedangkan jumlah penduduk yang bermata pencaharian buruh justru paling sedikit. Hal ini merupakan indikator bahwa kawasan perencanaan merupakan kawasan yang masih memiliki banyak lahan pertanian.

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Sekotong Tengah

No	Desa	PNS	Petani	Supir	Nelayan	Buruh	Pedagang	Lain-lain	Jumlah
1.	Sekotong Barat	56	1.642	43	46	69	287	380	2.523
2.	Pelangan	48	1.656	41	62	42	493	202	2.544
3.	Sekotong Tengah	142	2.720	122	0	43	447	672	4.146
4.	Buwun Mas	32	3.213	10	54	27	171	98	3.605
5.	Kedaro	53	684	36	0	18	432	351	1.574
6.	Batu Putih	39	1.230	30	68	24	363	144	1.898
Jumlah		370	11.145	282	230	223	2.193	1.847	16.290

Sumber: Kecamatan Sekotong Tengah Dalam Angka Tahun 2010



Gambar 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Sekotong Tengah

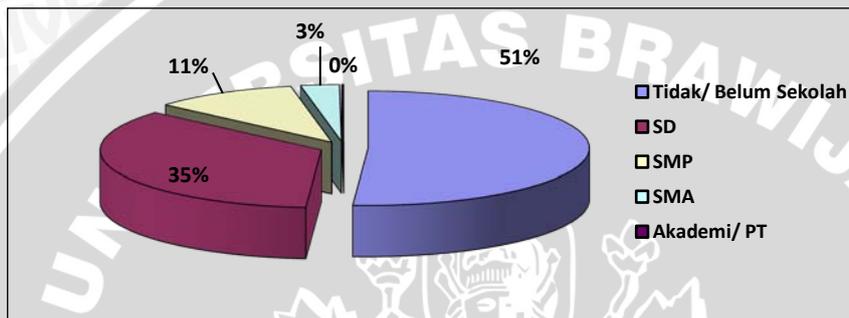
4. Tingkat pendidikan penduduk

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Sekotong Tengah, sebagian besar adalah tamatan SD yaitu sebesar 18.217 jiwa, dengan jumlah terbanyak berada di Desa Sekotong Tengah sebesar 6.385 jiwa. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tidak ataupun belum pernah sekolah masih sangat tinggi yaitu 26.344 jiwa atau 51,11 % dari total jumlah penduduk.

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Sekotong Tengah

No	Desa	Tidak/Belum Sekolah	SD	SMP	SMA	Akademi/ Perguruan Tinggi	Jumlah
1.	Sekotong Barat	5.580	1.395	1.030	291	15	8.310
2.	Pelangan	4.179	2.120	796	240	10	7.344
3.	Sekotong Tengah	6.196	6.385	1.084	282	29	13.976
4.	Buwun Mas	4.925	4.369	995	146	8	10.443
5.	Kedaro	1.822	1.998	848	292	12	4.972
6.	Batu Putih	3.643	1.950	694	203	4	6.495
Jumlah		26.344	18.217	5.447	1.453	78	51.540

Sumber: Kecamatan Sekotong Tengah Dalam Angka Tahun 2010



Gambar 4. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Sekotong Tengah

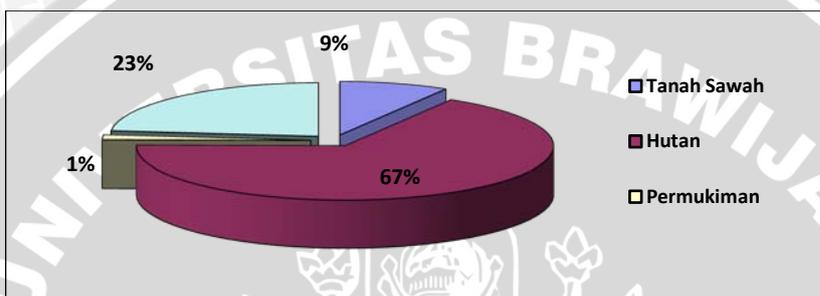
4.1.5 Guna lahan Kecamatan Sekotong Tengah

Tata guna lahan di Kecamatan Sekotong Tengah didominasi oleh guna lahan hutan, dengan luas keseluruhan mencapai 18.467 Ha yang terbagi dalam 3 (tiga) fungsi hutan yaitu hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan konservasi. Penggunaan lahan terbesar berikutnya adalah penggunaan kebun tanaman tahunan seluas 6.460 Ha, sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah permukiman seluas 408 Ha. Walaupun masyarakat lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, penggunaan lahan tanah sawah tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh jenis tanah di Kecamatan Sekotong Tengah merupakan jenis tanah kering dan sulit untuk mencari sumber irigasi. Sehingga masyarakat lebih banyak menggantungkan hidupnya sebagai petani perkebunan. Untuk lebih jelasnya guna lahan Kecamatan Sekotong dapat dilihat dalam Tabel 4.7 dan Gambar 4.9.

Tabel 4. 7 Guna Lahan per Desa Kecamatan Sekotong Tengah

No.	Desa	Tanah Sawah (Ha)	Hutan (Ha)	Permukiman (Ha)	Kebun Tanaman Tahunan (Ha)	Kebun Campuran (Ha)	Tegalan (Ha)	Jumlah (Ha)
1.	Sekotong Barat		305	98	1.403	1.422	48	3.276
2.	Pelangan	632	5.143	50			1.378	7.203
3.	Sekotong Tengah	1.721	1.074	154	1.004	163	168	4.284
4.	Buwun Mas		6.007	46	2.386	624	83	9.163
5.	Kedaro		1.063	33	1.667			2.763
6.	Batu Putih		4.875	27		1.373	106	6.354
Jumlah		2.353	18.467	408	6.460	3.582	1.783	33.045

Sumber: Kecamatan Sekotong Tengah Dalam Angka Tahun 2010



Gambar 4. 8 Persentase Guna Lahan Kecamatan Sekotong Tengah

Gambar 4. 9 Peta guna lahan kecamatan Sekoteng



4.1.6 Potensi sumber daya alam

Terdapat beberapa sumber daya alam yang sangat berpotensi di Kecamatan Sekotong Tengah, antara lain:

1. Sumber daya hutan

Potensi sumber daya kehutanan di kawasan hutan Sekotong mencakup keanekaragaman potensi biota dengan luas areal 18.467 Ha, yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan konservasi yang berupa Taman Wisata Alam (TWA Bangko-Bangko). Sebagian besar sumber daya alam kawasan hutan hingga saat ini belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat. Akan tetapi sebagian kecil masyarakat ada yang telah memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan agroforestri dengan sistem tumpangsari.

2. Sumber daya mineral

Potensi sumber daya mineral mencakup berbagai jenis komoditi mineral yang dibagi dalam golongan B dan C. Penggolongan bahan galian ini didasarkan atas fungsi serta perannya dalam kehidupan manusia.

- a. Bahan galian golongan B adalah bahan galian yang mempunyai nilai vital, jenis galian ini sebagian besar terdiri dari bahan galian logam. Bahan galian yang terdapat di Kecamatan Sekotong Tengah antara lain emas, pasir besi, dan tembaga. Kondisi Pulau Lombok yang termasuk kedalam kategori pulau kecil, tidak memungkinkan untuk mendukung kegiatan eksplorasi bahan galian B karena dampak lingkungan yang ditimbulkan akan sangat besar. Sehingga, sampai saat ini peraturan tata ruang tidak memperbolehkan adanya kegiatan penambangan bahan galian B.
- b. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk kedalam golongan A dan B, jenis bahan galian ini termasuk kedalam jenis bahan galian industri, yaitu bahan galian yang dapat digunakan secara langsung tanpa atau sedikit melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan galian C yang terdapat di Kecamatan Sekotong Tengah antara lain pasir, marmer, batu bangunan, tanah urug, tanah liat, gamping (kapur), batu apung, dan batuan andesit.

3. Potensi wisata

Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Kecamatan Sekotong Tengah sebagai salah satu kawasan pengembangan pariwisata. Potensi pariwisata yang ditawarkan dikawasan ini meliputi panorama alam perbukitan, rekreasi pantai seperti berjemur, diving, memancing, dan pantai pasir putih. Selain itu kawasan ini juga

memiliki potensi wisata sejarah yaitu terdapatnya sisa-sisa peninggalan jaman penjajahan Jepang berupa puing-puing benteng pemantau pertahanan Jepang lengkap dengan meriamnya. Selain potensi pariwisata, Kecamatan Sekotong Tengah juga memiliki potensi dibidang perikanan, perkebunan, dan pertanian. Di sini terdapat potensi budidaya mutiara, budidaya tambak udang, jagung, jarak, mente, rumput laut, dan peternakan.



Gambar 4. 10 Kawasan Objek Wisata Pantai Sekotong

4.2 Karakteristik Kawasan Hutan Sekotong

Pemanfaatan ruang kawasan hutan Sekotong telah diatur dalam produk tata ruang berupa RTRWP Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa rencana kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi harus dikelola sebagaimana fungsi utamanya.

4.2.1 Identifikasi karakteristik kondisi fisik Hutan Sekotong

Lahan pengembangan wilayah merupakan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Kecamatan Sekotong Tengah memiliki luas mencapai 33.045 Ha yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan Sekotong saat ini telah menyalahi aturan tata ruang dan menyebabkan terjadinya degradasi hutan dari berbagai tekanan baik faktor alami maupun faktor buatan. Untuk lebih jelasnya pembagian kawasan hutan Sekotong berdasarkan fungsinya beserta lokasi tambang ilegal dapat dilihat pada Gambar 4.12.

a. Kawasan hutan lindung

Hutan lindung di kawasan Hutan Sekotong memiliki wilayah seluas 5.671,83 Ha yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan ketentuan RTRWP NTB 2009-2029 kawasan hutan lindung harus dipertahankan

luasannya dan melarang adanya alih fungsi dalam bentuk apapun. Masyarakat sekitar kawasan hutan saat ini, memanfaatkan hutan lindung hanya sebatas mendapatkan hasil hutan non kayu yang sebagian dijual dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Ranting pohon yang berjatuh pun dimanfaatkan sebagai kayu bakar oleh masyarakat sekitar.

Kawasan hutan lindung dikelola langsung oleh Dinas Kehutanan, namun sejauh ini pengelolaannya belum melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya waktu dan petugas yang kompeten untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga pihak Dinas Kehutanan merasa khawatir apabila terjadi kerusakan kawasan hutan akibat ketidaktahuan masyarakat dalam mengelola hutan.

b. Kawasan hutan konservasi

Hutan konservasi di kawasan Hutan Sekotong mencapai luasan 2.754,17 Ha dan memiliki fungsi antara lindung dengan produksi. Sebagian kawasan hutan konservasi berupa taman wisata alam yaitu TWA Bangko-bangko. Hutan Taman Wisata Alam Bangko-bangko termasuk dalam tipe ekosistem hutan pantai dan hutan hujan dataran rendah. Dalam hutan konservasi terdapat tumbuhan langka khas NTB yaitu Kelicung (*Dyospiros malabarica*). Sedangkan vegetasi pada pantai Bangko-bangko antara lain famili *Bruguiera*, *Pandanaceae*, *Soneratiaceae* dan *Rubiceae*. Jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di bentang hutan hujan dataran rendahnya, diantaranya Bajur (*Pterospermum javanicum*), Kesambi (*Schleicera oleosa*), Waru (*Hibiscus tiliaceus*). Pada bagian tepi tebing hutan TWA Bangko-bangko terdapat sisa-sisa peninggalan jaman penjajahan Jepang berupa puing-puing benteng pemantau pertahanan Jepang lengkap dengan meriamnya.

Selain itu dibagian tepi pantainya dapat dijumpai aneka satwa antara lain Ayam hutan (*Gallus varius*), Elang bondol (*Haliastur indus*), Koakiau (*Philemon buceroides*), ayam hutan, Raja udang dan elang laut, sebelumnya juga terdapat rusa timor (*Cervus timorensis*) dan Babi Hutan (*Sus Scrova scrova*). Pada TWA Bangko-bangko juga dapat ditemukan kupu-kupu langka yang dilindungi, yaitu *Throides helena*.

Pemanfaatan kawasan hutan konservasi saat ini telah sesuai dengan arahan kebijakan RTRWP NTB 2009-2029 yang mengarahkan pengembangan kegiatan pariwisata khususnya untuk Kecamatan Sekotong Tengah dengan kegiatan konservasi berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan hidup.

Sedangkan untuk pengelolaannya, pemerintah telah memberikan akses yang cukup kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi antara lain memperbolehkan masyarakat untuk mendapatkan hasil hutan non kayu dan mengembangkan kegiatan tumpangsari yang dapat menambah pendapatan masyarakat.

c. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi memiliki luasan wilayah seluas 10.041 Ha. Keseluruhan lokasi pertambangan yang ada saat ini berada pada kawasan hutan produksi terbatas yang masuk dalam area HKm (hutan kemasyarakatan) dan HTR (hutan tanaman rakyat). HKm merupakan area hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah, perbandingan pengelolaannya adalah 60% oleh masyarakat sedangkan 40% oleh pemerintah. Sedangkan HTR merupakan hutan yang hasil hutannya lebih dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena area HTR lebih banyak ditanami dengan tanaman sengon yang memiliki nilai ekonomis. Ketentuan penebangan pohon yang diatur dalam setiap kesepakatan antara Perhutani dengan perusahaan-perusahaan pengelola hutan adalah menebang satu pohon diharuskan menggantinya dengan menanam 10 pohon pada jenis yang sama. Selain itu sistem yang digunakan adalah sistem tebang pilih dan dilakukan pada kawasan HTI (hutan tanaman industri). Luas area HKm mencapai 2.495Ha yang terbagi menjadi 39 petak, sedangkan luas HTR ± 750Ha.

Sedangkan karakteristik kondisi fisik kawasan Hutan Sekotong yang dikaji antara lain kelerengan, jenis tanah, serta iklim dan curah hujan.

1. Kelerengan lahan

Kawasan hutan Sekotong merupakan kawasan yang memiliki topografi bervariasi mulai dari daerah yang relatif datar hingga perbukitan dengan kemiringan lereng antara $0 \geq 40\%$, tetapi sebagian besar kawasan hutan yang memiliki kemiringan hingga $> 40\%$ dan berada pada ketinggian 0 – 500 m dpl. Lereng atau kemiringan lahan yang dimaksud merupakan faktor yang sangat perlu dipertimbangkan dalam segala kegiatan pembangunan, karena lereng atau kemiringan lahan sangat berpengaruh terhadap erosi permukaan tanah.

Semakin panjang dan semakin besar kemiringan lahan akan semakin cepat aliran permukaan dan daya angkut dari aliran tersebut. Oleh sebab itu sebagian kawasan hutan di Kecamatan Sekotong Tengah termasuk dalam kriteria kawasan lindung sebagaimana diuraikan dalam Perda Provinsi NTB No.11 Tahun 2006 karena ada sebagian kawasan

yang memiliki kelerengan yang cukup besar. Kelerengan yang besar, curah hujan yang tinggi, dan alih fungsi lahan hutan menjadi pertambangan ilegal semakin memperbesar kemungkinan terjadinya longsor dan degradasi hutan. Untuk lebih jelasnya kelerengan kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 4.11.

2. Jenis tanah

Posisi Provinsi NTB jika dilihat dari tatanan geologi Indonesia terletak pada pertemuan dua lempeng besar (Lempeng Hindia-Australia dan Lempeng Eurasia) yang berinteraksi dan saling berbenturan. Batas kedua lempeng ini merupakan daerah yang sangat labil, karena di tempat ini tertumpuk energi yang sangat besar dan sewaktu-waktu dapat terlepas dalam bentuk gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah longsor (<http://ntb.go.id/deskripsiwilayah>).

Oleh sebab itu kondisi geologi kawasan hutan Sekotong dicirikan dengan adanya formasi batuan gunung api berumur tersier, yang terdiri atas batu pasir, batu lempung dan intrusi batuan beku. Secara stratigrafi, batu lempung berada di bagian bawah kemudian di atasnya berupa batu pasir bersilang jari dengan breksi vulkanik. Lapisan-lapisan batuan ini kemudian diterobos oleh intrusi batuan beku. Batuan-batuan ini termasuk ke dalam formasi pengulung yang berumur tertua, yaitu tersier (oligosen). Batuan ini menutupi hampir seluruh wilayah Kecamatan Sekotong Tengah. Sehingga secara umum wilayah ini rawan terjadi bencana yang bersifat geologi seperti gempa, gerakan tanah, amblesan dan gelombang tsunami.

Jenis tanah yang terdapat di kawasan hutan Sekotong berupa aluvial yang berasal dari hasil erosi yang terjadi di daerah perbukitan kemudian terbawa air dan mengendap di daerah datar. Selain itu juga terdapat tanah litosol yang terdiri dari batu-batu. Jenis tanah aluvial dengan variasi kedalaman tanah $60 \geq 90$ cm terdapat di sekitar pantai dan daerah sekitar alur sungai, sementara tanah litosol dengan variasi kedalaman tanah 30 – 60 cm terdapat pada bagian perbukitan.

Disamping kedua jenis tanah tersebut, di sekitar kawasan hutan Sekotong terdapat jenis tanah mediteran (tanah kapur) dan tanah grumosol (tanah berat). Kedua jenis tanah ini berasal dari batuan kapur dan merupakan tanah bertekstur liat (bertekstur berat) dengan kedalaman tanah yang relatif dalam (> 1 m). Untuk lebih jelasnya jenis tanah di kawasan hutan Sekotong dapat dilihat dalam Gambar 4.12.

3. Iklim dan curah hujan

Iklim merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan tanah, sedangkan suhu dan curah hujan sangat berpengaruh terhadap reaksi kimia dan fisika

dalam tanah. Setiap suhu naik 10 derajat Celcius, maka kecepatan reaksi menjadi dua kali lipat, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas micro organisme dalam tanah. Curah hujan selain penting dalam mempengaruhi pembentukan tanah, juga sangat penting terhadap pertumbuhan tanaman.

Komponen iklim (suhu, kelembaban, angin, dan penyinaran matahari) beserta komponen hidrologi (hari hujan dan curah hujan) di Kecamatan Sekotong Tengah dapat dilihat pada tabel 4.8 dan tabel 4.9.

Tabel 4. 8 Kondisi Iklim Kecamatan Sekotong Tengah

Bulan	Suhu Maksimum (°C)	Suhu Minimum (°C)	Kelembaban Udara (%)	Rata-rata Penyinaran Matahari (%)	Kecepatan Angin (Knots)
Januari	31,5	24,5	80	58	15
Februari	31,4	24,2	81	47	35
Maret	31,4	23,3	84	49	14
April	32,0	23,0	81	72	12
Mei	31,6	22,4	78	84	12
Juni	30,8	21,8	78	81	10
Juli	30,2	21,3	75	84	12
Agustus	30,8	21,9	76	68	15
September	31,9	23,2	76	74	18
Oktober	32,7	24,2	79	69	15
November	31,8	24,0	84	41	15
Desember	31,4	24,7	80	40	14
Rata-rata	31,5	23,2	79	64	16

Sumber: Kecamatan Sekotong Tengah Dalam Angka Tahun 2010

Wilayah Kecamatan Sekotong Tengah memiliki suhu udara maksimum rata-rata setiap bulan mencapai 31,5°C, sedangkan rata-rata suhu minimum tiap bulannya adalah 23,2°C. Kisaran kelembaban rata-rata setiap bulannya antara 75% - 84%.

Seperti halnya daerah-daerah lain, Kecamatan Sekotong Tengah mempunyai 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Rata-rata jumlah curah hujan tahun 2009 tercatat 1.179,9 mm dengan hari hujan sebanyak 84 hari dan curah hujan per hari ialah sebesar 14,05 mm/hari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli hingga bulan Oktober, sedangkan curah hujan tinggi terjadi pada bulan November hingga bulan April. Tingginya curah hujan pada bulan tersebut sejalan dengan persentase penyinaran pada bulan-bulan tersebut yang relatif rendah yaitu 41% - 72%. Data ini diperoleh melalui stasiun metereologi Selaparang Kota Mataram dan stasiun metereologi Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 4. 9 Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Rata-rata
Kecamatan Sekotong Tengah

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Januari	11	114
Februari	19	128,3
Maret	9	76,8
April	13	124,6
Mei	5	79,8
Juni	6	92,2
Juli	2	10,3
Agustus	1	6,5
September	1	-
Oktober	3	6,7
November	11	133,5
Desember	20	407,2
Jumlah	84	1179,9

Sumber: Kecamatan Sekotong Tengah Dalam Angka Tahun 2010

Dari hasil wawancara, wilayah Kecamatan Sekotong Tengah terutama yang berada di sebelah utara sering mengalami banjir. Data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) diketahui bahwa pada bulan Februari 1999, wilayah ini mengalami bencana banjir yang mengakibatkan ±391 rumah warga rusak, selain itu pada Desember 2003 terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan atas ±200 Ha tambak dan ±400 Ha lahan pertanian di wilayah Desa Buwun Mas. Banjir terbesar ketiga terjadi pada Maret 2008 yang mengakibatkan rusaknya jalan penghubung antara Kecamatan Lembar dengan Kecamatan Sokotong Tengah yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Sekotong Tengah. Selain itu juga sering terjadi longsor pada saat musim hujan di Desa Kedaro dan Desa Pelangan.



Gambar 4. 11 Peta kelereng kawasan hutan Sekoteng



Gambar 4. 12 Peta jenis tanah kawasan hutan Sekoteng



Gambar 4. 13 Peta curah hujan kawasan hutan Sekoteng



4.2.2 Kegiatan pertambangan ilegal kawasan Hutan Sekotong

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Hutan Sekotong memiliki mata pencaharian sebagai petani baik petani sawah, petani kebun, maupun petani hutan. Dalam kehidupan sehari-hari, pendapatan yang mereka peroleh terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga masih banyak anak pada usia sekolah lebih memilih berdiam diri di rumah untuk membantu mencari penghasilan tambahan. Akibatnya, jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah di Kecamatan Sekotong Tengah masih cukup tinggi.

Kesadaran masyarakat tentang pendidikan semakin berkurang ketika ada pertambangan yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 penambang di kawasan Hutan Sekotong kurang lebih mencapai 1.200 orang. Kegiatan pertambangan ilegal ini dimanfaatkan oleh penduduk untuk mencari pendapatan tambahan yang lebih besar. Banyak tenda-tenda yang didirikan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan sebagai tempat menginap, karena lokasi pertambangan medannya cukup sulit untuk dijangkau, sehingga para penambang lebih memilih untuk menginap.

Bukan hanya kegiatan pertambangan yang berkembang di sekitar kawasan hutan, warung-warung makan dan kios juga mulai bertambah jumlahnya. Perubahan aktivitas di sekitar kawasan hutan yang semakin lama semakin luas, secara tidak langsung akan mengurangi fungsi hutan. Para penambang membangun tenda-tenda dengan terpal di kawasan hutan produksi yang saling berdekatan satu sama lain. Untuk satu lokasi pertambangan bisa mencapai 4 petak HTR yang masing-masing luasannya bisa mencapai ± 20 Ha per petak. Terdapat 4 titik lokasi pertambangan di kawasan hutan produksi, sehingga total luasan kawasan hutan yang mengalami alih fungsi ± 320 Ha.

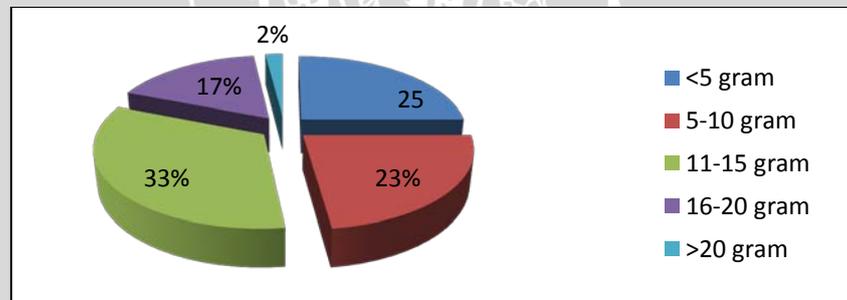


Gambar 4. 14 Lubang Galian Tambang di Kawasan Hutan Sekotong

Lubang galian yang digunakan oleh penambang memiliki kedalaman mencapai ± 50 m yang semuanya dilakukan dengan peralatan sederhana. Secara teknis pembuatan

lubang dilakukan dengan menggali tanah secara vertikal terlebih dahulu, setelah mencapai tempat sasaran dilanjutkan dengan menggali secara horizontal mengikuti urat tanah yang mengandung emas. Sedangkan panjang galian horizontal bisa mencapai kedalaman \pm 30m. Apabila pada titik yang telah digali tidak mengandung emas, masyarakat akan mencobanya pada titik yang lain sebagian besar ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Pembuatan lubang galian pun bervariasi lamanya tergantung kondisi tanah dan jumlah pekerja yang terlibat di dalamnya. Yaitu bisa mencapai satu hingga dua minggu untuk satu tambang dengan kedalaman 40 meter.

Hasil yang diperoleh masyarakat pun bervariasi, bisa mencapai 11-15 gram emas untuk satu kali musim panen. Tetapi, tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mendapatkan apa-apa. Setelah mendapatkan batuan emas, masyarakat mengolahnya untuk mendapatkan bijih emasnya dengan mesin gelondongan. Limbah pengolahan yang telah dibuang, terkadang masih dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari butiran emas yang ikut terbang. Pendulangan ini dilakukan secara tradisional dengan peralatan seadanya.



Gambar 4. 15 Persentase Hasil yang Diperoleh Masyarakat

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dan berlangsung hingga saat ini belum memiliki ijin dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Sehingga berdasarkan arahan kebijakan RTRWP NTB 2009-2029 pemanfaatan kawasan hutan produksi tidak sesuai.

Gambar 4. 16 Peta pembagian fungsi hutan kawasan hutan Sekoteng



4.2.3 Dampak kegiatan alih fungsi

Alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lainnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun bila tidak dicermati dan dipertimbangkan secara matang dari aspek lingkungan, ekologi, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, maka alih fungsi tersebut akan menimbulkan dampak negatif baik secara lokal maupun dalam skala luas.

Pembukaan lahan sebagai pertambangan dilakukan tanpa ijin oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan belum ada studi lebih lanjut mengenai kondisi kawasan pertambangan walaupun pada dasarnya kebijakan tata ruang melarang adanya pertambangan di kawasan hutan Sekotong. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat mendorong masyarakat tidak berpikir panjang untuk melakukan pertambangan di kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara, harga kebutuhan pokok dan biaya sekolah merupakan penyebab utama masyarakat untuk mencari pendapatan tambahan. Alih fungsi hutan Sekotong yang dilakukan masyarakat secara ilegal menimbulkan beberapa dampak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

a. Dampak terhadap perubahan guna lahan

Adanya kegiatan pertambangan ilegal secara langsung menyebabkan terjadinya perubahan guna lahan yang awalnya berupa kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan. Penutupan lahan akibat alih fungsi juga berdampak pada meningkatnya jumlah lahan kritis di kawasan hutan Sekotong. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa kondisi hutan Sekotong saat ini dalam keadaan memprihatinkan (kritis), karena sebagian besar kawasan hutan sudah gundul dan sulit untuk menemukan tumbuhan berdiameter besar. Untuk lahan kritis di kawasan hutan Sekotong mencapai 5.604 Ha, lahan sangat kritis mencapai 2.132 Ha, dan lahan agak kritis mencapai 1.132 Ha.

Kondisi seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap penurunan kuantitas air. Akibatnya, pada musim kemarau sumber air mengalami kekeringan, terutama pada daerah hilir sungai karena cadangan air tanah rendah bahkan tidak ada, sedangkan pada musim penghujan, potensi banjir menjadi tinggi. Selain itu pertambangan ilegal menyebabkan terjadinya pertumbuhan usaha penunjang kegiatan pertambangan di sekitar kawasan hutan seperti warung makan dan fabrikasi alat-alat pertambangan konvensional. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.



Gambar 4. 17 Lahan Kritis Kawasan Hutan Sekotong



Gambar 4. 18 Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Sekotong

b. Dampak terhadap lingkungan

Terjadinya erosi di hutan Sekotong yang lebih banyak disebabkan adanya curah hujan tinggi menerpa permukaan tanah terbuka akibat penebangan pohon atau terjadinya pergeseran permukaan tanah. Berkurangnya jumlah pohon di wilayah studi juga berdampak pada terjadinya banjir di beberapa desa. Hal ini dikarenakan meningkatnya debit puncak aliran sungai dibandingkan kondisi sebelum hutan dialihfungsikan, meskipun dengan kondisi curah hujan yang relatif tetap.

Efek negatif lain yang dapat terjadi dari proses alih fungsi kawasan hutan adalah terjadinya pencemaran seperti debu dan asap yang mengotori udara dan air, suara bising yang berasal dari berbagai alat pertambangan, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Pengolahan bebatuan tersebut sampai menjadi emas menggunakan air raksa. Air raksa adalah suatu logam yang beracun yang berada pada lingkungan, baik bersifat organik maupun non organik, yang semuanya dapat berada pada media tanah, udara dan air serta dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan gangguan kesehatan pada makhluk hidup.



Gambar 4. 19 Pengolahan Logam Emas yang Mencemari Lingkungan

c. Dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

Dampak non fisik akibat pertambangan ilegal di kawasan hutan Sekotong adalah terjadinya penurunan jumlah petani di Kecamatan Sekotong Tengah. Para penduduk

yang awalnya bermatapencaharian sebagai buruh tani lebih memilih menjadi buruh pembersih tanah sisa pengolahan emas karena pendapatan yang diperoleh lebih besar.

Selain itu terjadi konflik sosial, yaitu persaingan antar buruh tambang. Demi mendapatkan hasil yang banyak, para pekerja tambang rela mempertaruhkan nyawa. Agar lebih berani dan meyakinkan sebelum masuk ke dalam liang tambang, para pekerja meminum minuman keras terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan adanya perubahan budaya dalam masyarakat.

Terganggunya kegiatan sektor lain, seperti pertanian juga terjadi. Hal ini disebabkan oleh rusaknya irigasi dan perubahan alur sungai, dan perubahan kontur. Sehingga hasil pertanian yang diperoleh juga kurang maksimal.

4.2.4 Analisis pemanfaatan lahan kawasan Hutan Sekotong

A. Kelerengan lahan

Kelerengan lahan merupakan salah satu faktor penting penentu kegiatan yang berlangsung di atasnya. Dari total luas kawasan hutan, sebagian besar kawasan yaitu 40% berada dalam tingkat kelerengan agak curam (15-25%), 22% kawasan berada dalam tingkat kelerengan sangat curam (lebih dari 40%), 17% kawasan berada dalam tingkat kelerengan datar (0-8%), 11% kawasan berada dalam tingkat kelerengan curam (25-40%), dan 10% berada dalam tingkat kelerengan landai (8-15%).

Sehingga dapat diketahui bahwa sekitar 89% kawasan hutan merupakan daerah yang rawan longsor. Kawasan dalam tingkat kelerengan curam hingga sangat curam tidak diperbolehkan di atasnya berlangsung kegiatan yang dapat merubah topografi sekitar. Sedangkan kegiatan pertambangan ilegal bukan hanya dapat merubah topografi, tetapi juga memperbesar terjadinya erosi tanah akibat penebangan pohon untuk membuat galian tambang. Dari data yang ada maka skor untuk kriteria kelerengan kawasan Hutan Sekotong bervariasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Skoring Kriteria Kelerengan Lahan Kawasan Hutan Sekotong

Kriteria	Kelerengan	Klasifikasi	Skor untuk kemampuan lahan
Kelerengan lahan	0-8%	Datar	20
	8-15%	Landai	40
	15-25%	Curam	60
	25-40%	Agak curam	80
	>40%	Sangat curam	100

B. Jenis tanah

Kawasan Hutan Sekotong memiliki beberapa jenis tanah yang berbeda tingkat kepekaannya terhadap longsor antara lain aluvial, mediteran, grumosol, dan litosol. Sebagian besar kawasan hutan yaitu 65% dari total luasan merupakan tanah mediteran, sisanya terbagi dalam tiga jenis tanah lainnya. Tanah mediteran yang juga merupakan tanah kapur pada umumnya memiliki tekstur liat, berwarna merah hingga coklat kemerahan, pH 6,5 hingga 7,5, serta mudah mengembang pada saat basah, mengerut dan pecah saat kemarau. Berdasarkan sifatnya yang mudah terpengaruh oleh faktor cuaca, maka dapat diketahui bahwa jenis tanah ini termasuk rentan terhadap longsor.

Pada bagian lain kawasan Hutan Sekotong, terdapat jenis tanah litosol yang merupakan jenis tanah yang sangat peka terhadap longsor dan memiliki material berupa tanah lempung/liat berpasir serta terdiri dari batuan andesit. Material lempung pasir sangat mudah meresapkan air hujan kedalam tanah, sedangkan air hujan tidak dapat menembus lapisan batuan andesit. Akibatnya apabila hujan turun, akan terjadi akumulasi air di atas lapisan batuan andesit yang mengalir ketempat yang lebih rendah dengan membawa material yang berada di atasnya. Hal ini dapat menyebabkan longsor karena beban massa tanah di atasnya, terlebih jika tidak ada penahan (pepohonan) laju air, maka peluang terjadinya longsor akan semakin besar.

Tabel 4. 11 Skoring Kriteria Jenis Tanah Kawasan Hutan Sekotong

Kriteria	Kelerengan	Klasifikasi	Skor untuk kemampuan lahan
Jenis tanah	Aluvial	Tidak peka	15
	Mediteran	Agak peka	45
	Grumosol	Peka	60
	Litosol	Sangat peka	75

C. Curah hujan

Intensitas hujan menentukan besarnya erosi yang akan terjadi pada wilayah yang bersangkutan. Intensitas hujan yang sama jika hanya terjadi dalam waktu singkat akan memungkinkan terjadinya erosi, sedangkan dalam waktu relatif lama (lebih dari 6 jam) akan memungkinkan terjadinya longsor. Kawasan Hutan Sekotong memiliki curah hujan yang tergolong rendah yaitu 1.179,9 mm/tahun atau 14,05 mm/hari. Sehingga secara keseluruhan penggunaan skor untuk kemampuan lahan memiliki skor 20.

Kondisi fisik wilayah studi dianalisis dengan menggunakan teknik *overlay* dari beberapa sub variabel, yaitu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan yang telah diuraikan sebelumnya.

Untuk kerusakan yang terjadi, berdasarkan hasil analisis deskriptif karakteristik kawasan Hutan Sekotong yang telah dilakukan sebelumnya serta sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, maka menurut intensitas sarana gangguan yang dikemukakan oleh C.H. Sukardi (2007), kawasan Hutan Sekotong dapat dikategorikan dalam kerusakan berat. Hal ini ditandai oleh adanya eksploitasi dengan sistem tebang habis di beberapa titik dan adanya pengalihfungsian kawasan hutan menjadi tambang ilegal.

Sedangkan untuk analisis kemampuan lahan, kriteria yang digunakan antara lain kelerengan lapangan, jenis tanah menurut kepekaan erosi, dan intensitas hujan harian rata-rata yang masing-masing sub variabel telah dijelaskan sebelumnya. Skoring yang digunakan mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 yang dapat dilihat pada BAB II halaman 12. Teknik yang digunakan adalah teknik *overlay*. Analisis ini bertujuan untuk mempermudah penentuan fungsi kawasan dan arahan kegiatan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tetap mengacu pada ketentuan Perda No.3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 yaitu tetap mempertahankan luasan kawasan lindung. Analisis kemampuan lahan dilakukan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing sub variabel, sehingga diperoleh total skor yang dibutuhkan. Interval total skor yang digunakan antara lain (kawasan lindung), 125-174 (kawasan konservasi), dan ≤ 124 (kawasan produksi).

Tabel 4. 12 Skoring Analisis Kemampuan Lahan Kawasan Hutan Sekotong

Sub variabel	Kriteria	Klasifikasi	Skor
Curah hujan (mm/tahun)	13,6 - 20,7	Rendah	20
Kelerengan (%)	0 - 8	Datar	20
	8 - 15	Landai	40
	15 - 25	Agak curam	60
	25 - 40	Curam	80
	> 40	Sangat curam	100
Jenis tanah	Aluvial	Tidak peka	15
	Mediteran	Agak peka	45
	Grumosol	Peka	60
	Litosol	Sangat peka	75

Berdasarkan hasil *overlay*, diperoleh tiga zona dengan batas kawasan yang berbeda dari kondisi eksisting. Kawasan pertama adalah kawasan lindung dengan total skoring 175-195 seluas 5.163,5 Ha. Kedua, kawasan konservasi dengan total skoring 125-165 seluas 5.874,21 Ha. Ketiga kawasan produksi dengan total skoring 55-95 seluas 7.429,29 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.23 dan Gambar 4.24.

Selain analisis kemampuan lahan, untuk mengetahui pemanfaatan lahan di kawasan Hutan Sekotong, ada juga analisis kesesuaian lahan. Analisis kesesuaian lahan dilakukan untuk merevisi alokasi penggunaan lahan dengan membandingkan kondisi eksisting dan hasil analisis kemampuan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Gambar 4.23.

Tabel 4. 13 Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Hutan Sekotong

No.	Penggunaan lahan	Luas (Ha)	Evaluasi kesesuaian	Keterangan
1.	Hutan konservasi	1.162	Tidak sesuai, kendala hanya pada kelerengan yang tidak terlalu curam, sehingga pemanfaatannya masih dapat dimaksimalkan untuk hutan produksi.	I
2.	Hutan lindung	2.176	Tidak sesuai, berdasarkan jenis tanah, kawasan ini lebih sesuai jika dimanfaatkan untuk kawasan hutan konservasi.	II
3.	Hutan konservasi	183	Sesuai	III
4.	Hutan lindung	2.292	Tidak sesuai, kelerengan dan jenis tanah pada kawasan ini masih tergolong menengah. Kelerengan tidak terlalu curam dan jenis tanah tidak terlalu peka terhadap longsor sehingga lebih sesuai jika dimanfaatkan sebagai kawasan hutan produksi.	IV
5.	Hutan produksi	2.216	Tidak sesuai, kelerengan tidak terlalu curam, tetapi jenis tanah merupakan tanah yang sangat peka terhadap longsor sehingga pemanfaatannya lebih sesuai sebagai kawasan hutan lindung.	V
6.	Hutan konservasi	217	Tidak sesuai, memiliki kelerengan yang sangat curam dengan jenis tanah yang agak peka terhadap longsor, sehingga akan lebih sesuai jika kawasan ini menjadi hutan lindung.	VI
7.	Hutan lindung	2.052	Sesuai	VII
8.	Hutan produksi	5.376	Sesuai	VIII
9.	Hutan produksi	2.793	Tidak sesuai, memiliki jenis tanah dari tidak peka hingga peka terhadap longsor dengan kelerengan curam hingga sangat curam, maka pemanfaatannya akan lebih sesuai sebagai kawasan hutan konservasi.	IX

Gambar 4. 20 Peta skoring kelerengan kawasan hutan Sekotong



Gambar 4. 21 Peta skoring jenis tanah kawasan hutan Sekotong



Gambar 4. 22 Peta analisis kemampuan lahan kawasan hutan Sekotong



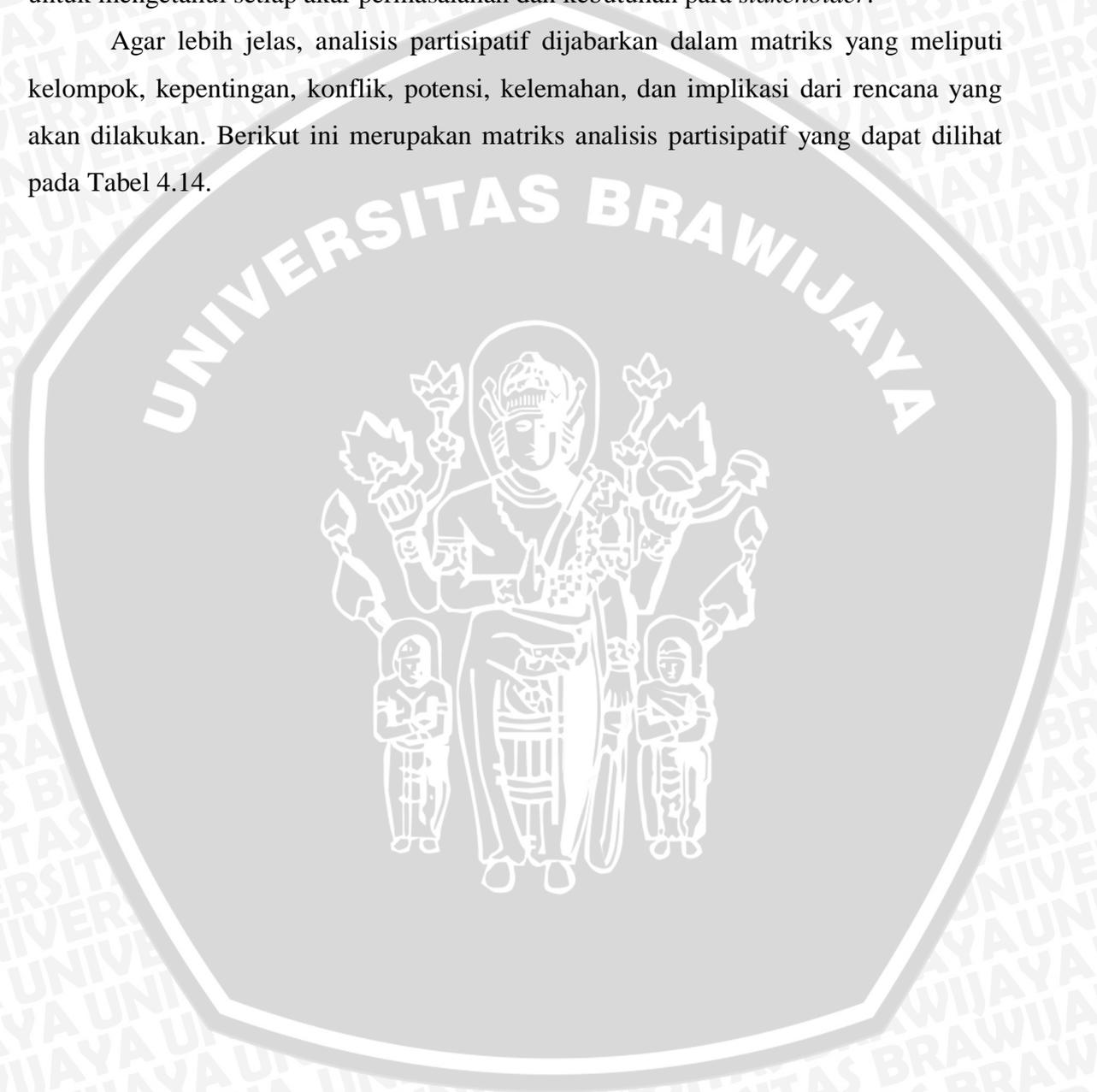
Gambar 4. 23 Peta analisis kesesuaian lahan kawasan hutan Sekotong



4.2.5 Analisis partisipatif

Analisis partisipatif dilakukan dengan melihat kepentingan dari semua *stakeholder* sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu arahan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam analisis partisipatif, setiap aspek kepentingan termasuk kekhawatiran, konflik antar kepentingan, potensi, dan kelemahan dijabarkan untuk mengetahui setiap akar permasalahan dan kebutuhan para *stakeholder*.

Agar lebih jelas, analisis partisipatif dijabarkan dalam matriks yang meliputi kelompok, kepentingan, konflik, potensi, kelemahan, dan implikasi dari rencana yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan matriks analisis partisipatif yang dapat dilihat pada Tabel 4.14.



Tabel 4. 14 Analisis Partisipatif

No.	Kelompok	Keperntingan	Kekhawatiran	Konflik antar kepentingan	Potensi	Kelemahan	Arahan
1	KPSA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan hutan dengan memperhatikan kelestariannya ▪ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerusakan hutan karena pengelolaan yang tidak memperhatikan pelestariannya ▪ Ketidakmerataan pembagian lahan bagi masyarakat yang membutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 vs 2 1 vs 5 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Kehutanan ▪ Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ▪ Meningkatkan PAD ▪ Kelestarian hutan terjaga ▪ Membangun kesadaran masyarakat akan pemeliharaan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian maupun guna lahan lainnya akan meningkatkan potensi bahaya erosi dan banjir jika tidak dikelola dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem pertanian yang memperhatikan lingkungan hutan ▪ Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pentingnya ekologi lingkungan dengan penyuluhan
2	Penambang ilegal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat ▪ Pendapatan tinggi ▪ Kemudahan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya distribusi dan pengangkutan yang tinggi ▪ Habisnya barang tambang karena eksploitasi terus-menerus ▪ Bahaya erosi dan longsor ▪ Kerusakan lingkungan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 vs 1 2 vs 3 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pendapatan masyarakat ▪ Meningkatnya PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sulitnya medan yang harus dilalui untuk melakukan pertambangan dan sifat tanah yang cenderung labil. ▪ Kurangnya pengetahuan penambang tentang keselamatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengetahuan dan penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian alam ▪ Peningkatan kualitas SDM dan pengetahuan dengan pelatihan dan penyuluhan
3	Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun program untuk melestarikan kawasan hutan ▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan ▪ Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pelestarian menyimpang dari program ▪ Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 vs 2 3 vs 5 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelestarian hutan terjaga ▪ Membangun kesadaran masyarakat akan pemeliharaan hutan ▪ Pemerataan kesejahteraan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sulitnya medan yang harus dilalui oleh para petugas ▪ Penegakkan hukum kurang tegas terhadap para pelaku pengerusakan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas SDM dan pengetahuan dengan pelatihan dan penyuluhan ▪ Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pentingnya

No.	Kelompok	Keperingan	Kekhawatiran	Konflik antar kepentingan	Potensi	Kelemahan	Arahan
4	Aparat pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> pengawasan terhadap keberlangsungan kawasan hutan Meningkatkan pembangunan yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan Menjaga kelangsungan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan kualitas hutan yang bukan hanya disebabkan oleh penyerobotan kayu, tetapi juga lahan hutan Kesejahteraan masyarakat tetap atau bahkan menurun Banyaknya pihak yang melanggar aturan tata ruang 	4 vs 5	<ul style="list-style-type: none"> Struktur kelembagaan yang terorganisir Keberhasilan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama yang kurang dengan masyarakat dan lembaga yang lain Kurangnya SDM yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> partisipasi dengan penyuluhan Zonasi untuk lahan-lahan yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang lain Peningkatan kualitas SDM dan pengetahuan dengan pelatihan dan penyuluhan
5	Kelompok tani hutan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pendapatan Mendapatkan kepastian akses dalam pengelolaan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan hutan yang telah diatur bersama pemerintah belum terlaksana dengan baik Berkurangnya produktivitas hutan akibat adanya pertambangan ilegal Harga jual hasil hutan yang ditentukan oleh tengkulak 	5 vs 2 5 vs 4	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kelestarian kawasan hutan Meningkatkan jumlah lapangan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan hutan Kurangnya SDM kelompok tani hutan dalam mengolah hasil hutan Kepastian akses dalam mengelola hutan masih lemah 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kepastian akses untuk kelompok tani hutan dan memberikan pelatihan terkait dengan pengolahan hasil hutan Memanfaatkan secara maksimal peran koperasi
6	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya peningkatan 	6 vs 1 6 vs 3	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk yang berusia 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan program pendidikan agar

No.	Kelompok	Keperentingan	Kekhawatiran	Konflik antar kepentingan	Potensi	Kelemahan	Arahan
		<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan informasi kondisi hutan beserta sumber daya alamnya Mendapatkan hak yang sama untuk ikut mengelola hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> pendapatan Pemerintah tidak mau bekerjasama untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang dapat dikelola masyarakat Pembagian lahan garapan dalam kawasan hutan tidak merata 	6 vs 4	<ul style="list-style-type: none"> produktif cukup tinggi Sifat masyarakat yang masih menjunjung tinggi rasa kegotongroyongan dan kekeluargaan Persamaan gender dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> pengelolaan hutan Kurangnya pendidikan dan ketrampilan Kurangnya jumlah sarana prasarana Pendapatan masyarakat yang relatif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> menghasilkan SDM yang berkualitas Peningkatan pengetahuan dan SDM dengan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan mengelola hutan.



Penjelasan mengenai Tabel 4.14 tersebut meliputi kepentingan, konflik antar *stakeholder*, dan kelemahan di kawasan hutan Sekotong dijelaskan sebagai berikut:

1. KPSA (Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam)

KPSA yang beranggotakan 30 orang, memiliki kepentingan untuk mengelola hutan secara lestari dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani secara tumpangsari. Masyarakat juga diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan non kayu. Sedangkan kekhawatiran yang dihadapi KPSA adalah masyarakat mengelola hutan tanpa diimbangi dengan pengetahuan tentang pelestarian, sehingga terjadi kerusakan hutan. Selain itu pembagian lahan hutan untuk bertani belum merata kepada masyarakat, karena kebutuhan lahan yang semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara, proses pembentukan KPSA terlalu cepat, sehingga menyebabkan kepengurusan KPSA menjadi kurang maksimal. Posisi KPSA yang dibentuk melalui proses secara instan seringkali tidak secara kuat mewakili kepentingan para petani hutan. Maka ketika kemudian KPSA menjadi satu-satunya lembaga yang diakui secara sah untuk melakukan kerjasama dengan Perhutani, kendala yang sering dihadapi adalah rendahnya tingkat kinerja dan tidak jelasnya orientasi kerja para pengurusnya. Sehingga untuk saat ini kondisinya adalah anggota KPSA berjalan secara individual.

Konflik yang muncul antara lain dengan penambang ilegal yaitu perambahan kawasan yang dilakukan oleh penambang sangat bertentangan dengan kepentingan KPSA untuk pelestarian hutan. Selain itu konflik juga terjadi antara KPSA dengan masyarakat, terutama masyarakat yang melakukan pengalihfungsian hutan secara ilegal baik sebagai pertambangan maupun lahan pertanian.

Seiring dengan kegiatan pengelolaan hutan, akan muncul berbagai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan. Diantaranya bahaya erosi dan longsor serta banjir jika hutan tidak dikelola dengan baik.

2. Kelompok penambang ilegal

Kelompok penambang ilegal menginginkan agar semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi, memiliki pendapatan yang tinggi, dan mendapatkan kemudahan akses untuk mengangkut hasil tambang, sedangkan kondisinya saat ini akses menuju lokasi tambang sangat sulit karena jalan berupa tanah dan sulitnya kendaraan masuk ke lokasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran berupa tingginya biaya pengangkutan ke tempat pengolahan dan pemasaran. Untuk satu kali pengangkutan hasil tambang ke tempat penggelondongan dengan menggunakan jip (mengangkut 25 karung), pemilik tambang

harus membayar Rp. 25.000,00 – Rp. 50.000,00 per karung. Bagi penambang ilegal yang hanya mendapatkan hasil tambang berupa emas kurang dari 15 gram hal ini akan memberatkan, karena pendapatan tambahan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu kelompok penambang ilegal menyebabkan adanya kekhawatiran terhadap habisnya barang tambang yang dieksploitasi secara terus menerus, terjadinya erosi dan longsor, serta kerusakan lingkungan hutan yang lebih parah.

Konflik yang terjadi yaitu antara kelompok penambang ilegal dengan KPSA karena perbedaan prinsip pengelolaan hutan, serta konflik antara kelompok penambang ilegal dengan Dinas Kehutanan yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan hutan dan melakukan kegiatan pelestarian. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penambang ilegal ini adalah medan yang sulit dan tingkat keamanan yang sangat rendah.



Gambar 4. 24 Kondisi Jalan Menuju Lokasi Tambang



Gambar 4. 25 Kondisi Tambang yang Sangat Berbahaya

3. Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan memiliki kepentingan untuk menyusun program pelestarian hutan, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelola hutan, dan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kebijakan terkait kehutanan. Ada beberapa kekhawatiran yang dirasakan oleh Dinas Kehutanan yaitu pelaksanaan program pelestarian tidak tepat sasaran karena berbagai faktor, sulitnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, dan penyerobotan lahan hutan yang akan lebih parah dampaknya dari penambangan liar.

Konflik yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan adalah dengan penambang ilegal dan masyarakat. Penambang ilegal tidak mau memperhatikan kebijakan tata ruang dan

memperparah rusaknya ekosistem hutan, sedangkan masyarakat kurang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan hutan. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan adalah sulitnya penegakkan hukum bagi pelanggar kebijakan tata ruang yang berlaku, karena masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal kurang memahami aspek hukum dan permasalahan tata ruang, sedangkan petugas sendiri masih kurang tegas dalam mengambil tindakan. Sehingga setelah permasalahan tambang ilegal ini meluas dan pemerintah semakin sulit untuk mengatasinya.

Pengelolaan hutan yang kurang maksimal terjadi juga disebabkan karena kurangnya pengawasan di kawasan hutan. Kawasan hutan Sekotong memiliki kelerengan yang bervariasi sehingga medan yang harus dilalui oleh petugas pengawas menjadi sulit. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luasan hutan juga menjadi penyebab sulitnya pengawasan kawasan hutan. Dinas Kehutanan hanya melakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan, sehingga tidak jarang petugas dari Kecamatan Sekotong Tengah sendiri yang turun secara langsung untuk memeriksa keadaan hutan. Hal ini yang terkadang menyebabkan terjadinya konflik karena kurangnya koordinasi antar pihak terkait termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan.

4. Aparat pemerintah

Kepentingan yang dimiliki oleh aparat pemerintah adalah meningkatkan pembangunan yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, juga menjaga kelangsungan hutan agar tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Sedangkan kekhawatiran yang dihadapi oleh aparat pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat tetap bahkan menurun serta banyaknya pihak yang melanggar ketentuan aturan tata ruang sehingga guna lahan dan pengelolaannya menjadi tidak sesuai.

Aparat pemerintah menghadapi konflik dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang, selain itu juga konflik intern yaitu tentang penetapan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang. Sedangkan permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya kerjasama dengan lembaga lainnya dan kurangnya SDM yang berkualitas untuk membantu penyuluhan kepada lembaga lain dan masyarakat.

5. Kelompok tani hutan

Kelompok tani hutan di kawasan Hutan Sekotong saat ini berjumlah \pm 600 orang yang tersebar di beberapa desa. Secara teknis, aktivitas kelompok tani hutan berada dibawah pengawasan KPSA. Kebutuhan para kelompok tani hutan semakin lama

semakin meningkat, dan sejalan dengan hal itu, permasalahan-permasalahan baru mulai bermunculan. Salah satu diantaranya adalah keberadaan tengkulak yang bisa menentukan harga jual komoditas hutan yang tidak sesuai. Permasalahan lain yang timbul adalah keberadaan penambang ilegal yang ada di kawasan Hutan Sekotong saat ini menjadi salah satu faktor yang mengancam aktivitas mereka. Para penambang berpotensi merusak lingkungan hutan sehingga produktivitas hutan baik kayu maupun non kayu akan semakin berkurang. Selain itu, kepastian akses yang dimiliki kelompok tani semakin buram karena adanya tumpang tindih batas kawasan HKm (hutan kemasyarakatan) dengan HTI (hutan tanaman industri).

Kelompok petani hutan sudah memiliki KUB (kelompok usaha bersama) yang dibentuk sejak tahun 2000 saat mereka diberikan kewenangan mengelola HKm seluas 750 hektare lebih di kawasan Hutan Sekotong oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. Penetapan pemberian hak guna HKm selama 35 tahun bagi kelompok petani tersebut oleh kemenhut ini tertuang dalam sebuah kontrak kerja. Sedangkan kondisinya saat ini, salah satu perusahaan yang mengelola HTI mulai merambah kawasan HKm juga. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah dalam menegaskan batas kawasan pengelolaan. Sehingga, dari permasalahan-permasalahan tersebut konflik yang dihadapi oleh kelompok tani hutan adalah konflik dengan penambang ilegal dan aparat pemerintah.

Sebaiknya keberadaan dan kepentingan kelompok tani hutan bisa lebih diperhatikan oleh pihak terkait. Karena kelompok ini sangat berpotensi untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu diharapkan kedepannya melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

6. Masyarakat

Masyarakat memiliki kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan secepat mungkin. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui kondisi hutan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan secara transparan. Banyaknya masyarakat yang ikut mengelola hutan, menginginkan prosentase bagi hasil dikelola secara merata, adanya perluasan ruang kelola dan kepastian program pengelolaan hutan.

Konflik yang dihadapi oleh masyarakat adalah konflik dengan KPSA dan Dinas Kehutanan, dan aparat pemerintah. Masyarakat yang belum memiliki lahan pertanian dan pekerjaan tetap membutuhkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan cara yang digunakan masyarakat seringkali bertentangan dengan kebijakan yang telah

ditetapkan KPSA dan Dinas Kehutanan. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan, hal ini dikarenakan kurangnya peyuluhan mengenai kehutanan. Selain itu juga keterampilan dan pengetahuan yang masih rendah dalam meningkatkan pendapatan. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan

Penyebab deforestasi (alih fungsi hutan) dibagi menjadi 3 kelompok yaitu penyebab langsung, penyebab dasar, dan penyebab biofisik. Penyebab langsung merupakan aktifitas manusia yang secara langsung mempengaruhi kondisi tutupan hutan dan fungsinya seperti eksploitasi kayu, perluasan areal pertanian, perkebunan, pemukiman, industri, dan sebagainya. Penyebab dasar biasanya berupa faktor yang kompleks seperti faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan kependudukan. Penyebab biofisik yang kebanyakan berasal dari faktor alami.

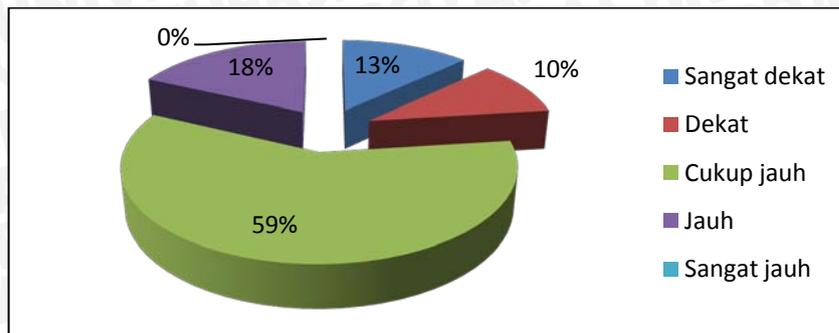
Berdasarkan kondisi eksisting yang ada, kawasan hutan Sekotong telah mengalami deforestasi yang disebabkan oleh aktivitas manusia menjadi pertambangan ilegal pada beberapa titik. Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Sekotong Tengah saat ini.

Kegiatan alih fungsi hutan merupakan variabel terikat yang akan diukur dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal yang dipergunakan dijabarkan menjadi indikator variabel berbentuk pernyataan. Peneliti membagikan kuisioner untuk mendapatkan data dari masing-masing variabel yang diperlukan. Kuesioner disusun dengan menggunakan alternatif jawaban yang berbeda-beda untuk masing-masing variabel yang dipertanyakan. Responden diminta memberikan tanggapan dengan memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan. Masing-masing variabel mempunyai beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Untuk skoring masing-masing kriteria yang digunakan dalam analisis korelasi ini, dapat dilihat pada BAB III halaman 45.

a. Jarak rumah dengan hutan

Jarak permukiman penduduk dengan kawasan Hutan Sekotong merupakan salah satu kriteria yang memberikan pengaruh terhadap interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan. semakin dekat jarak rumah penduduk dengan hutan, maka ada kemungkinan semakin besar interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan. Jarak

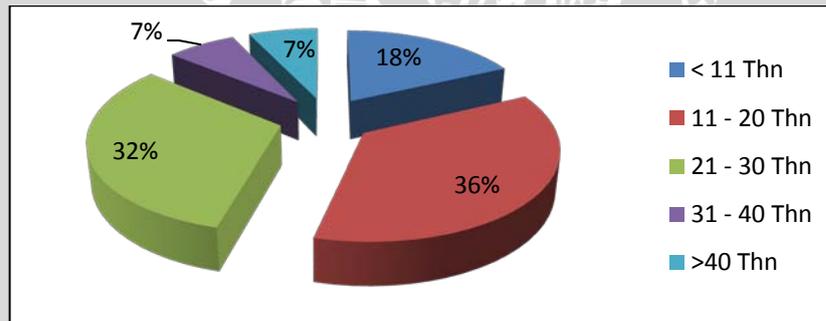
rumah terbagi menjadi sangat dekat (< 100m), dekat (100 – 300m), cukup jauh (301-500m), jauh (500-1000m), dan sangat jauh (>1000m).



Gambar 4. 26 Persentase Jarak Rumah dengan Kawasan Hutan Sekotong

b. Lama masa tinggal

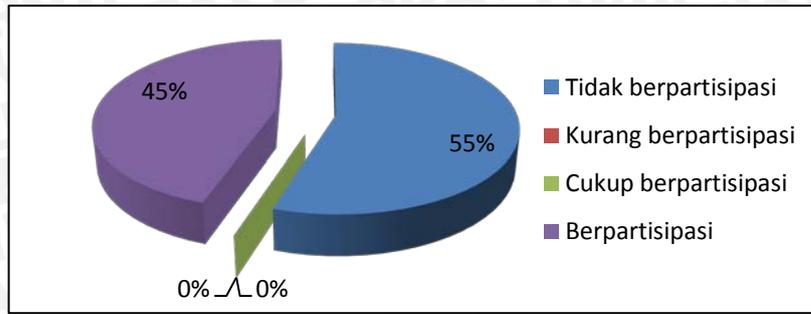
Lamanya waktu tinggal atau bermukim di wilayah studi juga memungkinkan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di wilayah studi sejak lama menganggap sebagian dari hutan yang berada di dekat lingkungan mereka adalah milik mereka. Dengan anggapan yang demikian, mereka berhak untuk melakukan apapun terhadap hutan. Lama masa tinggal masyarakat dibagi menjadi beberapa yaitu < 11 tahun, 11-20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, dan >40 tahun.



Gambar 4. 27 Persentase Lama Masa Tinggal di Kawasan Hutan Sekotong

c. Upaya pelestarian

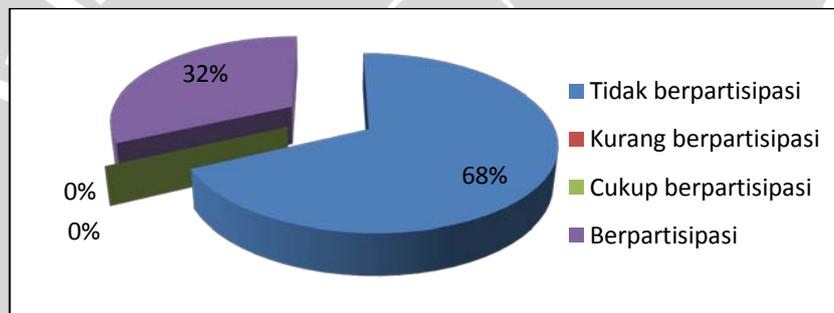
Upaya pelestarian kawasan hutan yang dimaksud adalah adanya upaya penanaman kembali kawasan Hutan Sekotong yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah studi. Hal ini merupakan salah satu interaksi dengan hutan yang berdampak positif. Upaya pelestarian dibagi kedalam kategori tidak berpartisipasi, kurang berpartisipasi, cukup berpartisipasi, dan berpartisipasi.



Gambar 4. 28 Persentase Upaya Pelestarian di Kawasan Hutan Sekotong

d. Keikutsertaan dalam penyuluhan hutan

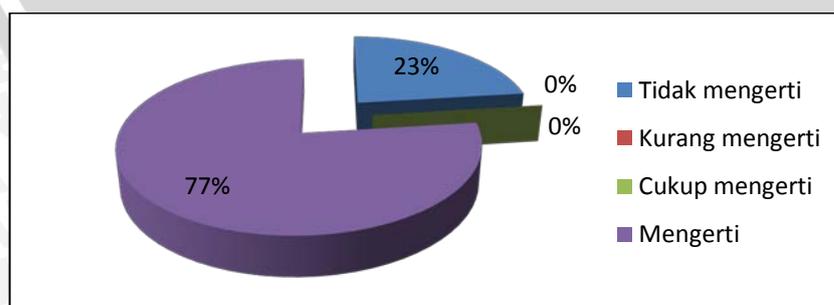
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan hutan memiliki peluang sebagai salah satu penyebab terjadinya alih fungsi hutan. Dengan mengikuti penyuluhan mengenai kawasan hutan, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan dan pengetahuan tentang pengelolaan hutan semakin meningkat, sehingga kegiatan pelestarian dapat dilakukan.



Gambar 4. 29 Persentase Keikutsertaan dalam Penyuluhan Hutan

e. Pengetahuan tentang fungsi hutan

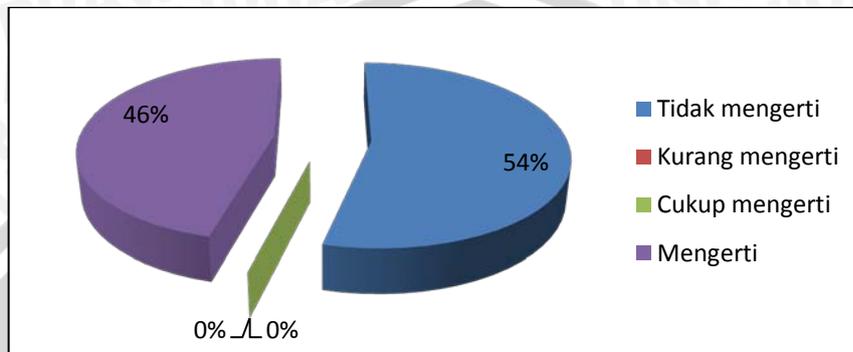
Pengetahuan tentang fungsi hutan merupakan kriteria yang cukup penting untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat. Pengetahuan tentang fungsi hutan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan tentang fungsi fisik dan biologi dari kawasan hutan.



Gambar 4. 30 Persentase Penduduk yang Memiliki Pengetahuan Tentang Fungsi Hutan

f. Pengetahuan tentang pengelolaan hutan

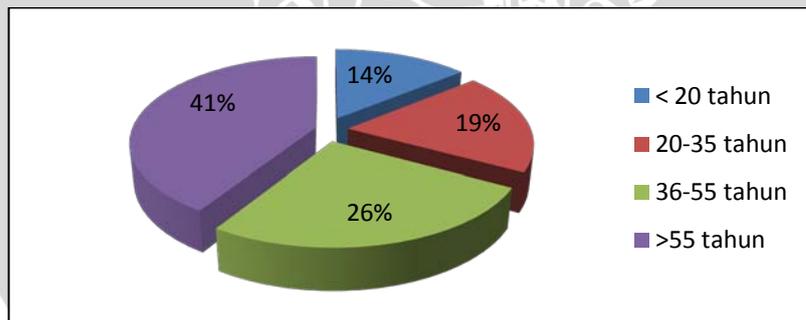
Pengetahuan tentang pengelolaan kawasan hutan tidak dimiliki oleh semua masyarakat, walaupun sebagian besar masyarakat mengetahui fungsi hutan. pengetahuan tentang pengelolaan kawasan hutan yang dimaksud adalah pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang dapat merusak kawasan hutan dan hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan Hutan Sekotong.



Gambar 4. 31 Persentase Penduduk yang Memiliki Pengetahuan Tentang Pengelolaan Hutan

g. Usia

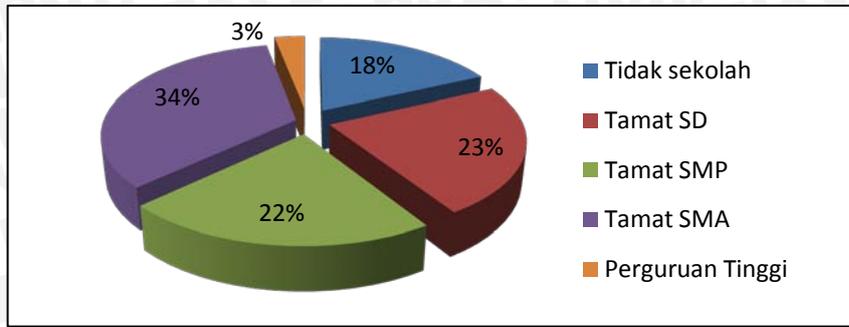
Kriteria usia diperlukan untuk melihat kesadaran masyarakat agar dapat diketahui rentang usia yang memberikan pengaruh secara langsung terhadap kondisi hutan. dengan mengetahui rentang usia masyarakat yang memberi pengaruh, maka akan dikaitkan dengan alasan aktivitas masyarakat terhadap kawasan hutan.



Gambar 4. 32 Persentase Rentang Usia Penduduk

h. Pendidikan

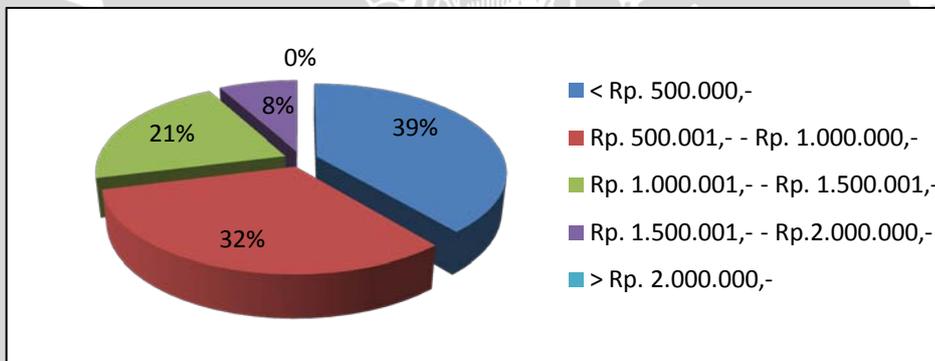
Tingkat pendidikan merupakan salah satu kriteria untuk melihat tingkat kesadaran masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka masyarakat cenderung lebih mengerti pentingnya Hutan Sekotong bagi kehidupan.



Gambar 4. 33 Persentase Pendidikan Penduduk Kawasan Hutan

i. Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh penduduk juga merupakan salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat terhadap hutan. Kurangnya penghasilan yang diperoleh masyarakat dari pekerjaan utama mereka, melatarbelakangi sebagian besar aktivitas masyarakat terhadap hutan. Sehingga diperlukan tahap identifikasi terhadap tingkat pendapatan masyarakat yang terbagi dalam beberapa klasifikasi.

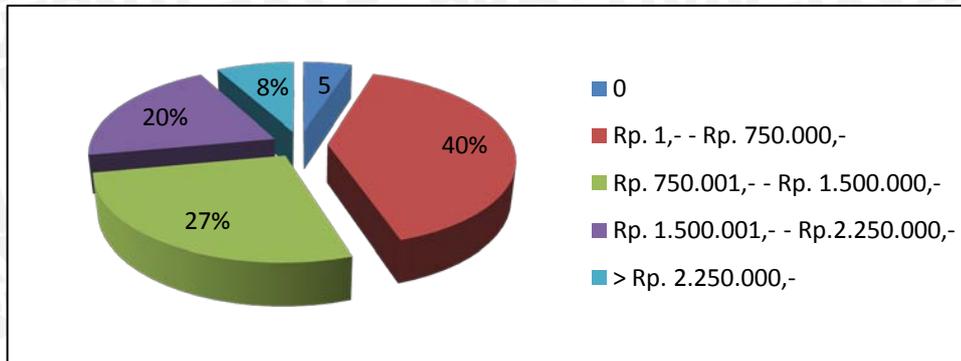


Gambar 4. 34 Persentase Pendapatan Penduduk Kawasan Hutan

j. Tingkat pendapatan tambahan

Tingkat pendapatan tambahan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat diluar mata pencaharian utama mereka dan berhubungan dengan pembukaan tambang ilegal. Kriteria ini perlu diidentifikasi karena memiliki peluang yang cukup besar untuk mempengaruhi aktivitas masyarakat terhadap hutan. Semakin banyak kebutuhan masyarakat semakin besar keinginan masyarakat untuk mencari pendapatan tambahan. Untuk mempermudah identifikasi, tingkat pendapatan tambahan masyarakat terbagi menjadi beberapa klasifikasi.





Gambar 4. 35 Persentase Pendapatan Penduduk Kawasan Hutan

Karena besaran pengaruh dari setiap variabel berbeda untuk masing-masing aktivitas masyarakat, sehingga analisis korelasi perlu dilakukan satu-persatu. Hasil analisis korelasi menggunakan program *SPSS 16 for Windows* untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak pada kondisi kawasan hutan Sekotong dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4. 15 Analisis Korelasi Pengalihfungsian Kawasan Hutan Sekotong

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Signifikansi	Koefisien Korelasi		
Alih fungsi hutan	Jarak rumah dengan hutan	.582	Tidak signifikan	.056	Sangat lemah
	Lama masa tinggal	.288	Tidak signifikan	.107	Sangat lemah
	Upaya pelestarian	.102	Tidak signifikan	-.165	Sangat lemah
	Keikutsertaan dalam penyuluhan hutan	.007	Signifikan	-.269	Lemah
	Pengetahuan tentang fungsi hutan	.311	Tidak signifikan	.102	Sangat lemah
	Pengetahuan tentang pengelolaan hutan	.000	Signifikan	-.743	Kuat
	Usia	.000	Signifikan	.487	Cukup
	Pendidikan	.000	Signifikan	.381	Lemah
	Tingkat pendapatan	.025	Signifikan	.223	Lemah
	Tingkat pendapatan tambahan	.000	Signifikan	.756	Kuat

Keterangan:

* Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi (Trihendardi, 2009):

- 0 – 0,2 : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada)
- > 0,2 – 0,4 : Korelasi lemah
- > 0,4 – 0,7 : Korelasi cukup
- > 0,7 – 0,9 : Korelasi kuat
- > 0,9 – 1 : Korelasi sangat kuat

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi dapat diketahui bahwa kondisi sosial-budaya, kependudukan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi hutan adalah upaya pelestarian, keikutsertaan dalam penyuluhan, pengetahuan tentang pengelolaan hutan, usia, pendidikan, mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan tingkat pendapatan tambahan. Sedangkan jarak rumah dengan hutan, lama masa tinggal, dan pengetahuan tentang fungsi hutan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Berikut adalah penjelasan mengenai variabel yang berpengaruh:

- Tingkat pendapatan tambahan

Variabel tingkat pendapatan tambahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alih fungsi hutan dengan nilai korelasi yang kuat dan bertanda positif (0,756). Artinya semakin tinggi alih fungsi hutan yang dilakukan, akan semakin tinggi juga pendapatan tambahan yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh bahan galian emas yang tersebar di kawasan hutan Sekotong, semakin luas lahan yang dialihfungsikan maka semakin besar peluang untuk mendapatkan batu emas dan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh.

Pengalihfungsian hutan menjadi tambang ilegal akan memberikan keuntungan yang lebih besar secara ekonomi, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Emas yang dihasilkan di Kecamatan Sekotong Tengah banyak diminati bukan hanya dari masyarakat Pulau Lombok saja, tetapi dari luar pulau juga.

Selain itu, tingginya biaya usaha kehutanan yang tidak didukung oleh ketersediaan anggaran dari pemerintah juga menjadi penyebab sulitnya pelaksanaan upaya pelestarian lingkungan hutan. Dari hasil wawancara yang diperoleh, untuk mengawasi kawasan hutan Sekotong diperlukan adanya pos pengawasan di beberapa titik, sedangkan pada kondisi eksisting, pos yang ada hanya 1 unit dan kondisinya tidak terawat. Beberapa program penghijauan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pertambangan ilegal memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari yang paling sederhana, yaitu buruh tambang yang bertugas untuk memasukkan tanah yang berupa campuran dari batuan mengandung emas yang sudah dihancurkan kemudian diolah dengan alat yang disebut gelondongan untuk memisahkan kandungan emasnya ke dalam karung menerima upah Rp. 1500,00 per karung, sehingga dalam sehari upah yang diterima mencapai ± Rp. 15.000,00 – Rp.30.000,00.



Gambar 4. 36 Batuan yang Mengandung Emas



Gambar 4. 37 Buruh Tambang di Kawasan Hutan Sekotong

Untuk pemilik usaha mesin gelondongan juga mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Dalam sehari pemilik bisa mendapatkan keuntungan hingga mencapai Rp. 360.000,00 dengan menyewakan 4 mesin gelondongan selama 9 jam. Sedangkan pemilik tambang dengan pengijon (pembeli emas hasil tambang dan pemberi modal) jika beruntung dalam 1 bulan keuntungan yang diperoleh bisa sampai 65 juta rupiah. Hasil yang diperoleh pun bervariasi karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti persebaran emas di kawasan Hutan Sekotong. Berdasarkan hasil survey, lebih banyak masyarakat yang mendapatkan emas hingga mencapai 16-20 gram dalam 1 musim panen. Tetapi bisa jadi dalam 1 kali musim panen para penambang tidak mendapatkan hasil sama sekali.



Gambar 4. 38 Peralatan Pendulang Emas (Mesin Gelondongan)

- Pengetahuan tentang pengelolaan hutan

Variabel ini memiliki pengaruh yang kuat dengan nilai negatif terhadap alih fungsi hutan (-0,743). Artinya semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan, maka akan semakin rendah tingkat alih fungsi hutan yang dilakukan. Jika masyarakat mengetahui cara pengelolaan hutan yang baik, maka mereka akan tetap mendapatkan hasil dari hutan tanpa harus merusak dan melakukan alih fungsi. Akan tetapi hal ini terkendala oleh kurangnya koordinasi dengan pihak pemerintah untuk melakukan pengelolaan hutan secara bersama-

sama. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan hutan masih kurang.

- Usia

Variabel usia memiliki pengaruh yang signifikan dan cukup kuat dengan nilai positif (0,487) terhadap kegiatan alih fungsi kawasan hutan Sekotong. Hampir seluruh masyarakat pelaku pengalih fungsian hutan berada di usia produktif yaitu 18-55 tahun. Masyarakat yang usianya lebih muda tidak diijinkan untuk ikut melakukan pertambangan, karena mereka diharuskan tetap fokus pada pendidikan. Akan tetapi disela-sela waktu bermain mereka, seringkali digunakan untuk membantu keluarganya yang bekerja di areal pertambangan.

Jumlah usia produktif juga berpengaruh besar terhadap pertambahan jumlah penduduk. Hal ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan dan keinginan. Semakin tinggi tingkat kebutuhan, akan semakin besar kemungkinan untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran.

- Pendidikan

Variabel pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alih fungsi hutan dan nilai korelasinya lemah dengan tanda positif (0,381). Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi alih fungsi hutan yang dilakukan. Sebagian besar pelaku penebangan memiliki tingkat pendidikan yang relatif sama yaitu tamatan SMA. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang merusak lingkungan sekitar hutan. Penduduk yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SMA lebih banyak bekerja di luar Kecamatan Sekotong Tengah sehingga memiliki modal yang lebih besar untuk melakukan penambangan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disebabkan berbagai faktor, diantaranya:

- Jumlah sarana pendidikan yang belum memadai

Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Sekotong Tengah masih kurang memadai. Berdasarkan data yang diperoleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2009, jumlah sarana pendidikan Kecamatan Sekotong Tengah seluruhnya adalah 42 unit yang terdiri dari 37 unit SD, 4 unit SMP, dan 1 unit SMA. Selain itu lokasi sarana yang cukup jauh dari rumah penduduk atau kurang strategis menyebabkan mereka lebih memilih berada dirumah.

- Kurangnya sosialisasi akan pentingnya pendidikan

Masyarakat harus diberikan pengertian tentang pentingnya pengetahuan dari bangku formal, sehingga wawasan yang diterima tidak hanya berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar.

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan rendah

Pola pikir atau kebudayaan masyarakat Kecamatan Sekotong Tengah yang masih menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang terpenting. Mereka beranggapan bahwa tanpa sekolah pun, mereka masih bisa bekerja baik dari bertani, mengurus ladang, beternak, atau bekerja sebagai nelayan.

- Keikutsertaan dalam penyuluhan

Variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai korelasi yang lemah dan bertanda negatif (-0,269). Artinya semakin tinggi masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan tentang kawasan hutan Sekotong, maka semakin rendah alih fungsi hutan yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena melalui penyuluhan masyarakat akan lebih mengerti arti pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan. Akan tetapi masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengikuti penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara, dalam 1 kali penyuluhan, bisa jadi masyarakat yang hadir hanya 20% - 25% dari keseluruhan kelompok sasaran. Hal inilah yang menjadi penyebab pihak pemerintah mengurangi intensitas penyuluhan dari dua kali sebulan menjadi satu kali dalam sebulan. Selain itu karena adanya pengaruh dari variabel lain menyebabkan alih fungsi hutan tetap dilakukan walaupun sebagian masyarakat mengikuti penyuluhan.

- Tingkat pendapatan

Variabel tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang lemah dengan nilai positif (0,223) terhadap kegiatan alih fungsi hutan. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin bertambah tidak didukung oleh peningkatan pendapatan. Bahkan sebagian masyarakat memiliki pengeluaran yang lebih besar dari pendapatannya. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari pendapatan tambahan yaitu salah satunya dengan mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi pertambangan. Sedangkan permasalahan yang terjadi terkait kawasan hutan adalah masih sulitnya pemasaran hasil hutan yang disebabkan oleh:

- Harga jual komoditas yang tidak menentu

Harga jual hasil hutan di Kecamatan Sekotong Tengah tidak menentu, hal ini dikarenakan hasil hutan yang diperoleh sebagian besar berasal dari tanaman

musiman. Sehingga pada saat hasil panen hutan berlimpah, harga komoditas menurun dan begitu juga sebaliknya.

- Kurangnya peran lembaga keuangan

Kecamatan Sekotong Tengah memiliki 1 KUD yang terletak di desa Sekotong Tengah. KUD ini kurang dirasakan masyarakat keberadaannya, karena kondisi sarana yang terbengkalai. Sehingga tidak ada yang mengakomodir pemasaran hasil hutan. Kurangnya penyuluhan mengenai pengelolaan KUD, baik dari pemerintah desa ataupun pemerintah desa menyebabkan hal tersebut terjadi.

- Tingginya biaya transportasi untuk mengangkut komoditas

Sebagian besar masyarakat yang menggantungkan diri dari hasil hutan tidak memiliki kendaraan angkutan. Mereka rata-rata hanya menggunakan sepeda motor untuk membawanya ke tengkulak maupun langsung dijual ke pasar. Jika ingin mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, mereka harus menjualnya keluar Kecamatan Sekotong Tengah. Akan tetapi biaya transportasi yang dikeluarkan juga lebih tinggi sedangkan keuntungan yang diperoleh tidak jauh beda dengan memasarkannya di dalam Kecamatan Sekotong Tengah.

- Upaya pelestarian

Variabel ini memberikan pengaruh yang tidak signifikan, korelasinya bernilai sangat lemah dengan tanda negatif (-0,165). Artinya semakin tinggi upaya pelestarian terhadap kawasan hutan Sekotong, maka akan semakin rendah alih fungsi hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi variabel ini sangat lemah pengaruhnya karena walaupun upaya pelestarian terus dilakukan, tidak sedikit masyarakat yang tetap melakukan alih fungsi disebabkan adanya pengaruh faktor lain.

- Lama masa tinggal

Lama masa tinggal memiliki nilai korelasi sangat lemah dan tidak signifikan (0,107). Semakin lama masyarakat tinggal di kawasan Hutan Sekotong, semakin besar alih fungsi hutan yang dilakukan. Tetapi variabel ini tidak signifikan karena berdasarkan hasil survey, masyarakat yang melakukan alih fungsi tidak hanya berasal dari sekitar kawasan hutan saja.

- Pengetahuan tentang fungsi hutan

Variabel ini memiliki nilai korelasi sangat lemah dengan nilai positif (0,102). Variabel pengetahuan tentang fungsi hutan memiliki nilai variabel yang dapat diabaikan. Dari hasil analisis diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan

tentang fungsi hutan, semakin besar alih fungsi yang dilakukan akan tetapi variabel ini tidak memiliki korelasi yang signifikan.

- Jarak rumah dengan hutan

Variabel ini memiliki nilai korelasi bernilai sangat lemah dan positif (0,056). Jarak rumah tidak mempengaruhi alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena bukan hanya masyarakat yang berinteraksi langsung dengan hutan saja yang melakukan alih fungsi tetapi masyarakat dari desa lain yang tidak berada di kawasan hutan pun ikut melakukan alih fungsi di kawasan hutan.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan menjadi pertambangan ilegal dengan nilai tertinggi dan signifikan adalah tingkat pendapatan tambahan dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan.

4.4 Strategi pencegahan alih fungsi hutan

Berdasarkan hasil analisis korelasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pengalihfungsian kawasan Hutan Sekotong adalah pengetahuan tentang pengelolaan hutan dan tingkat pendapatan tambahan masyarakat. Dengan mengetahui kedua faktor tersebut, maka strategi yang dapat direkomendasikan untuk mencegah alih fungsi kawasan hutan merupakan pengembangan dari konsep hutan lestari, yaitu pengelolaan hutan yang mencakup lestari secara produksi, lestari secara lingkungan, serta lestari secara sosial dan budaya.

Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan alih fungsi hutan berdasarkan konsep hutan lestari antara lain pengembangan agroforestri, pengembangan geowisata, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan agroforestri dimaksudkan untuk mengelola hutan dalam kategori lestari secara produksi. Agroforestri diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap pertanian berbasis hutan untuk menambah pendapatan dan sebagai upaya pengalihan minat aktivitas masyarakat dari pertambangan ilegal.

Pengembangan geowisata merupakan upaya untuk menjaga hutan dalam kategori lestari secara lingkungan. Setelah aktivitas masyarakat untuk pertambangan dihentikan, maka akan ada banyak bekas galian yang terbengkalai dan hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata. Sedangkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan ditujukan untuk pengelolaan hutan yang lestari secara sosial dan budaya, yaitu dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan menjaga keterbukaan dalam pengelolaan

hutan. Pemilihan alternatif ini selain didasarkan pada hasil analisis korelasi, juga didasarkan pada hasil analisis partisipatif yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis partisipatif yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian besar *stakeholder* sangat mendukung adanya pelestarian lingkungan di kawasan Hutan Sekotong. Akan tetapi, dilihat dari segi ekonomi kegiatan pertambangan memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan pada sektor lainnya dan peluang untuk kerusakan lingkungan juga lebih besar. Sehingga konsep hutan lestari akan sedikit banyak mengalami kendala dalam penerapannya, karena dikhawatirkan akan sulit mendapatkan respon yang kooperatif dari para penambang ilegal.

Agar lebih mudah, pelaksanaan konsep hutan lestari akan dilakukan secara bertahap dengan menyertakan partisipasi *stakeholder* dan bekerjasama dengan dinas terkait. Adapun tahapan yang dapat dilakukan antara lain:

- Melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat di Kecamatan Sekotong Tengah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian bukan hanya bagi penambang ilegal, tetapi juga masyarakat umum agar ikut menjaga kelestarian kawasan hutan.
- Melakukan sosialisasi tentang konsep hutan lestari dan strategi yang akan dilakukan (agroforestri dan geowisata) kepada para penambang ilegal sebagai alternatif untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Dalam sosialisasi ini akan dikemukakan keuntungan dan kelemahan dalam penerapan konsep hutan lestari.
- Menutup kegiatan pertambangan ilegal secara bertahap. Hal ini tidak dapat dilakukan sekaligus karena pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada kelestarian lingkungan.
- Melakukan zonasi kawasan untuk memperjelas batas-batas kegiatan yang bisa dilakukan dalam pengelolaan hutan.
- Melaksanakan kegiatan agroforestri yang terorganisir dalam kelompok tani, dengan dukungan masyarakat dan pemerintah.
- Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan geowisata. Selain berfungsi untuk meningkatkan pendapatan tambahan masyarakat, kawasan geowisata akan berpeluang besar untuk menjaga kelestarian lingkungan.

4.4.1 Strategi peningkatan pendapatan tambahan masyarakat

A. Pengembangan agroforestri

Agroforestri adalah suatu nama kolektif untuk sistem-sistem penggunaan lahan teknologi, dimana tanaman keras berkayu ditanam bersamaan dengan tanaman pertaian, dan/atau hewan, dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk pengaturan ruang dan didalamnya terdapat interaksi-interaksi ekologi dan ekonomi diantara berbagai komponen yang bersangkutan. Agroforestri berpotensi sebagai suatu upaya konservasi tanah dan air, serta menjamin keberlanjutan produksi pangan, bahan bakar, pakan ternak maupun hasil kayu, khususnya dari lahan-lahan marginal dan terdegradasi. Selain itu, pengembangan agroforestri juga berpotensi untuk menambah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan.

Sasaran keberlanjutan sistem agroforestri tidak bisa terlepas dari pertimbangan produktivitas maupun kemudahan untuk diadopsi dan diterapkan. Sistem agroforestri yang berorientasi pada konservasi sumber daya alam dan produktivitas jangka panjang ternyata juga merupakan salah satu daya tarik bagi beberapa petani. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan petani pada saat mereka merencanakan untuk menerapkan upaya konservasi, misalnya kepastian status lahan, pendapatan dalam jangka pendek, dan sebagainya. Alternatif lain untuk mendorong minat masyarakat dalam melakukan agroforestri adalah pemberian insentif yang dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi atau bantuan teknologi bagi petani.

Pengembangan agroforestri diharapkan mampu meningkatkan pendapatan tambahan bagi masyarakat selain dari pendapatan pokok yang diperoleh sehari-harinya, hal ini didasarkan pada hasil analisis korelasi bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan adalah pendapatan tambahan dengan nilai 0,756 yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan tambahan yang diperoleh, maka alih fungsi yang dilakukan juga akan semakin besar. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sistem agroforestri dalam kawasan Hutan Sekotong ini antara lain:

1. Agroforestri hanya akan dikembangkan pada kawasan hutan konservasi dan hutan produksi, sedangkan kawasan hutan lindung tidak termasuk didalamnya. Hal ini ditujukan untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan lindung yang tidak diperbolehkan adanya alih fungsi lahan dalam bentuk apapun termasuk penggarapan lahan pertanian secara intensif.

2. Kelestarian hutan yang ditekankan pada aspek ekonomi saja, diupayakan dapat mengakomodir kelestarian fungsi sosial dan lingkungan juga.
3. Tanaman yang digunakan merupakan perpaduan antara tanaman penghasil kayu, tanaman penghasil buah, dan tanaman semusim.
4. Pemilihan tanaman dilakukan berdasarkan kemudahan pengadaan bibit yang sesuai dengan kondisi hara kawasan hutan dan diupayakan terdapat komoditas unggulan untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi dan memudahkan pemasaran. Sedangkan untuk sistem pertanian yang digunakan adalah sistem tumpangsari. Sistem ini dipilih karena para petani hutan sedikit banyak telah mengetahui teknis pelaksanaan sistem tumpang sari dan sistem ini juga sesuai dengan kondisi hutan. Tumpang sari merupakan sistem penanaman dua jenis tanaman atau lebih pada lahan dan waktu yang sama.
5. Peningkatan koordinasi antara Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian untuk persiapan pengembangan agroforestri terkait dengan permodalan, sosialisasi, pengadaan bibit, dan pengelolaan.
6. Pemerintah ikut mendukung keberadaan KUD, sehingga KUD dapat berfungsi kembali untuk membantu permodalan bagi masyarakat dan mengkoordinir pemasaran hasil hutan yang dikelola masyarakat.
7. Perlu adanya pemberdayaan dan pembinaan terhadap pengusaha lokal yang dapat menghimpun masyarakat petani hutan di Kecamatan Sekotong Tengah sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan tengkulak atau pembeli langsung. Rekomendasi ini berdasarkan pada keluhan dari masyarakat penggarap hutan bahwa, pedagang pengumpul sering mempermainkan harga sehingga aktivitas mereka tergantung pada pedagang pengumpul. Melalui pembinaan pengusaha lokal ini diharapkan akan dapat memperpendek mata rantai perdagangan hasil hutan antara masyarakat dengan pembeli.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis untuk ditanam tujuan penanaman, jenis potensial dan tersedia, dan jenis yang bisa tumbuh di lokasi. Banyak jenis tanaman yang dapat diusahakan dalam sistem agroforestri, dari tanaman penghasil kayu sampai tanaman penghasil buahnya. Hasil survei WWF Nusa Tenggara dan Dinas Kehutanan Propinsi NTB (2000) menunjukkan paling tidak terdapat 38 jenis komoditi yang berpeluang untuk dikembangkan dalam pola tanam agroforestry. Dari jumlah ini diidentifikasi sekitar 29 komoditi dapat dipasarkan, baik secara langsung maupun melalui hotel dan restoran. Penampilan jenis-jenis tanaman yang berpeluang

untuk dijadikan komponen pola tanam dan diversifikasi jenis tanaman disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4. 16 Penampilan dan Peluang Pasar Beberapa Jenis Tanaman

No.	Jenis Komoditi	Alasan penanaman			Pemasaran		
		Harga tinggi	Banyak pembeli	Perawatan mudah	Bibit mudah	Pedagang pengumpul	Pasar
1.	Kemiri (<i>Aleurite moluccana</i>)	✓	✓	-	-	✓	✓
2.	Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Durian (<i>Durio zibethiunus</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Sukun (<i>Artocarpus communis</i>)	-	-	✓	✓	✓	✓
5.	Duku (<i>Lansium domesticum</i>)	✓	✓	-	-	✓	✓
6.	Petai (<i>Parkia speciosa</i>)	✓	✓	-	✓	✓	✓
7.	Bambu (<i>Bambosa sp.</i>)	-	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Kunyit (<i>Curcuma domestica</i>)	-	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Jahe (<i>Zingiber officinale</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Laos (<i>Languas galanga</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Cabai keriting (<i>Capsicum annum</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	Labu putih (<i>Langenaria siceraria</i>)	-	✓	-	-	✓	✓
13.	Alpoket (<i>Persea americana</i>)	✓	✓	-	-	✓	✓
14.	Komak (<i>Lablab purpureus</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15.	Ganyong (<i>Canna sp.</i>)	✓	✓	✓	-	✓	✓
16.	Kacang panjang (<i>Vigna unguiculata</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17.	Paria (<i>Momordica charantia</i>)	-	✓	✓	✓	✓	✓
18.	Cabai tandan (<i>Piper retrofractum</i>)	✓	✓	-	-	✓	✓
19.	Labu kuning (<i>Cucurbita moschata</i>)	-	✓	✓	✓	✓	✓
20.	Melinjo (<i>Gnetum gnemon</i>)	✓	✓	-	-	✓	✓
21.	Cabe rawit (<i>Capsicum frutescens</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22.	Jambu mete (<i>Eugenia aquae</i>)	✓	✓	✓	-	✓	✓
23.	Kecipir (<i>Psophocarpus tetragonolobus</i>)	-	✓	✓	✓	✓	✓
24.	Keladi/Talas (<i>Colocasia esculentum</i>)	-	✓	✓	✓	✓	✓
25.	Kepundung (<i>Baccaurea racemosa</i>)	-	✓	✓	-	✓	✓
26.	Kulur (<i>Artocarpus altitis</i>)	-	✓	✓	-	✓	✓
27.	Mangga (<i>Mangifera</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Jenis Komoditi	Alasan penanaman			Pemasaran		
		Harga tinggi	Banyak pembeli	Perawatan mudah	Bibit mudah	Pedagang pengumpul	Pasar
28.	<i>indica</i> Sawo (<i>Manilkara kauki</i>)	-	V	V	-	V	V
29.	Jamur (<i>Valvaerilla vavacea</i>)	-	-	-	-	V	V

Sumber: <http://library.forda-mof.org>

Keterangan:

: tanaman komoditi yang direkomendasikan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, walaupun tanaman tumpangsari yang direkomendasikan bibitnya tidak mudah didapatkan, akan tetapi ketiga jenis tanaman ini memberikan penghasilan yang cukup besar dalam satu musim tanam (sekitar 4 bulan) yaitu Rp.2.316.000,00/0,5Ha/musim tanam (<http://balittro.litbang.deptan.go.id>). Sedangkan untuk penghasil kayu, tanaman yang dapat dibudidayakan dalam pengembangan agroforestri antara lain sengon, jati, dan mahoni. Ketiga jenis tanaman tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan cocok dengan kondisi tanah maupun topografi kawasan Hutan Sekotong.

B. Pengembangan geowisata

Pengalihfungsian lahan secara ilegal merupakan salah satu masalah tata ruang yang sangat rentan dengan konflik. Pembukaan tambang di kawasan Hutan Sekotong sudah berlangsung cukup lama yaitu dari tahun 2004 hingga saat ini. Permasalahannya pun sudah semakin meluas, sehingga semakin sulit untuk mengatasinya. Beberapa titik di kawasan Hutan Sekotong telah mengalami degradasi akibat adanya tambang ilegal ini. Walaupun aturan tata ruang sudah jelas melarang dilakukannya pertambangan bahan galian golongan B, masyarakat tetap menentang peraturan tersebut.

Pengembangan geowisata merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, hal ini didasarkan pada hasil analisis korelasi yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan adalah tingkat pendapatan tambahan dengan nilai korelasi 0,756 yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan tambahan yang diperoleh, semakin besar alih fungsi yang dilakukan. Geowisata merupakan konsep pariwisata yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam secara aman dan lestari, sehingga diharapkan pariwisata dan pertambangan dapat berjalan beriringan dan berkelanjutan serta mampu menjadi alternatif untuk menambah pendapatan masyarakat yang diperoleh dari sektor pariwisata. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam mengembangkan konsep geowisata ini antara lain:

- Kawasan Hutan Sekotong merupakan kawasan yang memiliki keunikan ditinjau dari tanaman khas NTB yang perlu dilestarikan.
- Merupakan salah satu kawasan penyangga dan berfungsi sebagai pengatur tata air tanah yang dapat disuplai ke kawasan sekitarnya.
- Salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Mengakomodir terlaksananya aturan tata ruang yang melarang pertambangan bahan galian selain golongan C.
- Mengembalikan fungsi Pulau Lombok secara umum dan Kecamatan Sekotong secara khusus sebagai kawasan pengembangan pariwisata.
- Banyaknya mineral yang terkandung dalam kawasan Hutan Sekotong, berpotensi untuk mengembangkan daerah ini sebagai salah satu lokasi penelitian ilmiah tentang alam.

Untuk pengembangannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga konsep geowisata dapat dikelola dengan baik dan benar. Mulai dari pembagian zonasi kawasan, penentuan jalur wisata, dan aspek-aspek lain berupa sarana fisik dan non fisik yang mendukung jalur wisata, serta peran masyarakat disekitarnya. Pengembangan geowisata yang dapat menjadi arahan dalam mengelola kawasan Hutan Sekotong antara lain:

1. Peningkatan koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan kawasan geowisata terkait konsep geowisata, sosialisasi, promosi, dan pengembangannya.
2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta bukan lagi yang berorientasi kayu tetapi mengarah pada investasi pengembangan pariwisata.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang mampu menunjang pengembangan aktivitas geowisata seperti pengembangan pusat informasi, perbaikan pada akses menuju lubang galian ilegal yang ada, melengkapi lubang galian yang sudah ada dengan fasilitas yang sesuai standar keamanan, melengkapi fasilitas MCK, menambah pos pemantauan di beberapa titik kawasan hutan, dan penataan warung atau kios yang sudah ada.
4. Pengembangan kegiatan wisata yang menonjolkan keunikan, keindahan, dan kelangkaan seperti kegiatan penelitian (penelitian batuan, penelitian flora langka dan dilindungi, penelitian pelestarian kawasan hutan, dan penelitian habitat fauna) dan pengadaan atraksi wisata yang tidak merusak lingkungan (pengamatan satwa, *outbond*, dan menikmati alam).

5. Objek wisata pertambangan akan menjadi menarik bagi pengunjung lebih-lebih jika di kawasan tersebut terdapat program penghijauan atau konservasi lahan.
6. Melarang kegiatan pertambangan pada area baru, merehabilitasi lubang galian di beberapa titik yang sudah tidak terpakai, dan melakukan perlindungan terhadap flora dan fauna yang ada didalam kawasan Hutan Sekotong.
7. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan geowisata dengan menempatkan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam menyediakan jasa yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan geowisata.

Pengembangan geowisata ini diharapkan dapat mengembalikan kelestarian kawasan Hutan Sekotong. Selain itu dampak lain yang diharapkan adalah meningkatnya perekonomian penduduk karena ada sektor pariwisata di dalam kawasan hutan. Seiring dengan bertambahnya minat wisatawan menuju kawasan geowisata ini juga akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari bidang transportasi di Kecamatan Sekotong Tengah dan sentra industri kecil yang berkembang di rumah-rumah penduduk yang menjual makanan atau cinderamata khas Kecamatan Sekotong Tengah sebagai oleh-oleh.

4.4.2 Strategi peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan

Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan alih fungsi hutan adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan. Dari hasil kuisisioner dan wawancara, dapat diketahui bahwa hampir semua lapisan masyarakat sangat mendukung adanya kegiatan pelestarian hutan. Terlebih lagi kondisi pada beberapa titik yang mengalami alih fungsi sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan, diperlukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengelola hutan.

Diharapkan dengan peningkatan koordinasi, permasalahan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan hutan dapat diselesaikan, karena berdasarkan hasil analisis korelasi pengetahuan tentang pengelolaan hutan bernilai $-0,743$ yang berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang pengelolaan hutan, akan semakin rendah alih fungsi yang dilakukan. Hal ini juga tidak akan terlepas dari masyarakat sebagai sasaran pembangunan, sehingga pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan harus ditingkatkan. Adapun yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain:

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hutan dan kehutanan, seperti arti pentingnya keberadaan hutan bagi lingkungan, kegiatan yang diperbolehkan dalam zona-zona tertentu, pengelolaan hutan bersama masyarakat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran konservasi dan partisipasi dalam melestarikan hutan.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat dapat berhenti mendapatkan penghasilan dari kegiatan menebang pohon dan melakukan pertambangan secara liar apabila mereka mempunyai pilihan penghasilan lain. Salah satu contoh adalah dengan menyediakan sekolah informal yang dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat yang tidak lulus SD, atau memperkenalkan keterampilan dan teknik bertani yang lebih efektif, sederhana dan murah.
3. Apabila sudah ada komitmen dari masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah, maka program sosial kehutanan atau agroforestri yang direncanakan Dinas Kehutanan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut dengan memanfaatkan pemberdayaan masyarakat. Karena berdasarkan hasil pengamatan, terdapat cukup lahan untuk pertanian yang dapat dikembangkan dalam kawasan hutan seperti lamtoro, asam, kelapa, jambu mete, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak hutan.
4. Transportasi dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah dan sarana kesehatan perlu diperbaiki dan dibangun untuk mempercepat pembangunan di Kecamatan Sekotong Tengah. Masyarakat merasa bahwa kualitas hidup dapat secara otomatis meningkat apabila akses ke dunia luar diperbaiki, karena potensi untuk meningkatkan sumber daya manusia juga akan bertambah.
5. Dinas Kehutanan bersama pihak terkait dapat menetapkan kebijakan/peraturan dan sanksi-sanksi sebagai upaya melindungi kelestarian kawasan Hutan Sekotong.
6. Aparat pemerintah bersama masyarakat melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi kawasan hutan secara keseluruhan, sehingga kegiatan yang berdampak negatif akan segera dapat ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk menyelesaikan konflik pertambangan yang terjadi pada kawasan Hutan Sekotong upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Melarang dan menghentikan kegiatan pertambangan.

- Sosialisasi pemerintah kepada para penambang ilegal tentang arti pentingnya keberlanjutan hutan.
- Pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang mampu mempertahankan kelestarian hutan berupa penghargaan, kompensasi, maupun pengadaan infrastruktur.
- Melakukan tindakan preventif sebelum pengambilan tindakan administrasi maupun hukum terhadap pengerusakan lingkungan hutan.
- Penegakkan sanksi bagi pelanggar tata ruang dengan memberikan disinsentif berupa pemberian peringatan, pengenaan kompensasi, maupun pembatasan infrastruktur.

4.5 Arahan pengelolaan fungsi kawasan

Arahan pengelolaan fungsi kawasan adalah membagi Hutan Sekotong menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi. Pengembangan fungsi kawasan ini mengacu pada analisis kondisi fisik dan analisis kemampuan lahan yang telah dilakukan. Setelah diketahui masing-masing fungsi kawasan, maka ditentukan arahan kegiatan yang akan berlangsung di dalamnya.

Penerapan teknik pengendalian longsor lebih diarahkan ke daerah rawan longsor yang sudah terlanjur menjadi lahan kritis dan pertambangan ilegal. Areal rawan longsor yang belum dibuka direkomendasikan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi vegetasi permanen, seperti cagar alam, kawasan konservasi, dan hutan lindung. Berikut adalah arahan kegiatan untuk masing-masing kawasan.

A. Kawasan hutan lindung

Kawasan ini lebih diarahkan untuk tujuan konservasi (pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan). Dengan tetap mempertimbangkan Perda No.3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 yaitu mempertahankan luas kawasan lindung pada kondisi eksisting, maka untuk pengelolaannya kawasan hutan lindung mencapai 9.425 Ha. Aktifitas di kawasan ini sangat terbatas, hanya dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu. Mengingat kawasan ini cukup rawan terhadap terjadinya bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor, maka aktifitas tumpang sari tanaman palawija semusim dengan tingkat penggarapan lahan yang intensif tidak diperkenankan.

Kawasan ini memiliki ciri-ciri antara lain :

- Topografi curam, dengan kemiringan mencapai 40° atau lebih.
- Memiliki kerentanan tanah terhadap longsor pada tingkat sedang.

Sementara kawasan ini akan lebih difokuskan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan maka pendekatannya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Budaya Masyarakat

- Perubahan budaya masyarakat diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.
- Peningkatan kualitas SDM yang meliputi masyarakat sekitar hutan, Perhutani, Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya
- Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perubahan budaya masyarakat.

2. Kepastian Akses Masyarakat di kawasan hutan lindung

- Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan ini dengan budidaya tanaman musiman serta bekerja dalam kegiatan pertanian kehutanan, dengan komposisi sesuai karakteristik kawasan/wilayah yang dituangkan dalam perjanjian/kesepakatan tanpa ada kegiatan penebangan atau pengalihfungsian lahan, dengan alternatif :
 - 100 % tanaman kehutanan (homogen atau heterogen).
 - 80% tanaman kehutanan dan 20% tanaman musiman dan/atau tanaman kayu keras.
- Adanya bagi hasil (kegiatan , proses input – out put produksi).
- Kegiatan produktif yang dapat dilakukan di luar kawasan hutan dengan berbasis pada kawasan ini adalah peternakan dan industri kecil.
- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung didasarkan kepada perencanaan bersama.

B. Kawasan hutan konservasi

Kawasan hutan konservasi direncanakan memiliki dua fungsi yaitu selain sebagai kawasan konservasi juga dapat berfungsi sebagai kawasan produksi. Kawasan hutan konservasi akan lebih diarahkan untuk pemanfaatan non kayu dan memiliki kawasan seluas 2.869 Ha. Kawasan ini dicirikan antara lain:

- Topografi relatif landai, sedikit bergelombang.

- Kerentanan tanah terhadap longsor sedang hingga rendah.
- Interaksi kawasan dengan masyarakat cukup tinggi.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai arahan pengelolaan kawasan hutan konservasi antara lain:

1. Kepastian kawasan

Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta dengan peraturan kegiatan yang diperbolehkan.

2. Pengelolaan kawasan hutan

Pengelolaan hutan konservasi akan dibagi menjadi dua zona, yaitu:

- Zona I, merupakan kawasan yang akan digunakan sebagai kawasan pengembangan geowisata sekaligus reboisasi hutan dengan tanaman penghasil kayu dan semusim. Hal ini didasarkan pada peluang yang ada, yaitu lubang galian yang sudah tidak diperbolehkan aktivitas pertambangan didalamnya. Sedangkan kegiatan yang dikembangkan dapat berupa kegiatan wisata yang tidak merusak lingkungan seperti penelitian atau sekedar memberikan pemandangan alam yang menarik.
- Zona II, merupakan salah satu kawasan pengembangan agroforestri dengan ketentuan 70% tanaman kayu dan 30% tanaman penghasil buah maupun musiman.

Sebagai upaya pengembangan kawasan hutan konservasi secara ekonomi dan sosial, dan penyelesaian aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi saat ini, kegiatan ini dilakukan secara kemitraan dengan masyarakat, LSM, dan aparat pemerintah.

3. Reboisasi

Reboisasi yang dilakukan mengutamakan kelestarian lingkungan bukan pada kelestarian produksi. Tanaman yang diproduksi berupa tanaman kayu keras dan tanaman musiman. Pendekatan utama lebih diarahkan pada reklamasi dan rehabilitasi lubang galian yang ada dalam kawasan hutan konservasi.

Reklamasi merupakan usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi. Sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan yang dampaknya dapat semakin meluas bagi masyarakat.

C. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi akan diarahkan memiliki luasan mencapai 6.173 Ha, yang lebih diperuntukkan untuk menghasilkan hasil hutan, baik berupa kayu, non kayu maupun jasa lingkungan. Masyarakat di sekitar kawasan ini dapat melakukan aktifitas tumpang sari dengan berbagai tanaman palawija/semusim seperti sayur-sayuran dengan tanaman keras/kayu-kayuan lainnya, seperti kopi, coklat, cengkeh dan sebagainya. Kawasan ini dicirikan antara lain:

- Topografi relatif landai, sedikit bergelombang.
- Kerentanan tanah terhadap longsor pada posisi rendah.
- Interaksi positif dengan masyarakat tinggi, khususnya yang berada di sekitar hutan.
- Adanya bagi hasil melalui kesepakatan-kesepakatan (kegiatan, proses input – output produksi).

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kawasan dan potensi sumberdaya manusia adalah :

1. Kepastian Kawasan

Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penghentian *Illegal Logging* dan kegiatan pertambangan ilegal

Adanya kegiatan penghentian *illegal logging* dan kegiatan pertambangan ilegal secara partisipatif dan multi pihak. Hal ini dilakukan dengan jalan penegakan supremasi hukum, peningkatan sistem keamanan lingkungan di tingkat kecamatan dan desa oleh aparat dan masyarakat. Kegiatan *illegal logging* dan pertambangan ilegal sangat mengancam keberadaan sumberdaya alam berupa hutan, baik tegakan muda maupun tegakan tua.

3. Reboisasi

- Reboisasi dengan mengutamakan kelestarian produksi, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif melalui perencanaan secara partisipatif. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan melakukan zonasi penggarapan yaitu:
 - Zona I (penggarapan lahan oleh masyarakat besar), 100 % tanaman kehutanan (homogen atau heterogen) yang kemudian kawasan ini dapat dijadikan sebagai kawasan HTI. Pemilihan zona ini dilakukan berdasarkan karakteristik kawasan yang berada dalam kawasan dengan tingkat kerawanan longsor yang rendah. Diperbolehkan untuk mendapatkan hasil hutan kayu,

dengan ketentuan penebangan 1 pohon akan diganti dengan penanaman 10 pohon dengan jenis yang sama.

- Zona II (penggarapan lahan oleh masyarakat kecil), tanaman pokok kehutanan minimal 60% dan tanaman yang tumbuh cepat seperti sengon maksimal 40%.

- Jenis tanaman sesuai dengan kelas perusahaan (KP) dan jenis lain yang diusulkan oleh masyarakat sekitar hutan melalui kelompok tani hutan atau kelompok lain/lembaga.
- Sistem percampuran tanaman dengan pola dan jenis yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).
- Teknik agroforestri yang *multilayer* dan *multicrop* dapat digunakan secara bersamaan, yang merupakan bentuk kombinasi berbagai jenis dan pola tanaman (kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman pertanian), sehingga fungsi ekonomi dan sosial optimal.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder lain

- Apabila di lahan yang akan dikerjasamakan telah terdapat tanaman masyarakat, maka tanaman tersebut tidak harus dibersihkan.
- Bagi hasil hutan dari pengelolaan hutan baik yang berupa kayu maupun non kayu dan jasa lingkungan lainnya akan diatur dengan kesepakatan bersama para pihak secara proporsional dan penuh keadilan.
- Tidak ada bagi hasil dari kegiatan tumpang sari biasa (non agribisnis) seperti tanaman semusim yang ditanam petani/kelompok tani hutan.
- Adanya *stakeholder* lain yang ikut berperan dalam pengembangan kapasitas masyarakat, maupun penyedia dana dan pasar.
- Adanya pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berorientasi kepada kelestarian produksi, lingkungan dan sosial sebagai pengawas dan pembimbing.
- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi didasarkan kepada perencanaan partisipatif.

5. Kegiatan yang Terintegrasi

- Program pengembangan peternakan, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan hasil hutan kayu maupun non kayu.
- Adanya industri pengolahan pasca panen bagi hasil hutan non kayu dan hasil tumpang sari akan meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan daya saing.

6. Pengembangan Hutan Rakyat yang ditujukan untuk :

- Pembangunan unit manajemen hutan rakyat yang mendukung keberlanjutan produk dan ekologi.
- Adanya pengelolaan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan daya jual produk-produk hasil hutan rakyat.
- Membangun jaringan pasar produk hasil hutan rakyat untuk menjamin terserapnya produk-produk hutan rakyat dengan nilai ekonomi yang layak.
- Tata usaha kayu hutan rakyat harus didorong selalu kondusif terhadap iklim usaha kayu rakyat. Inisiatif-inisiatif insentif bagi pengelolaan hutan rakyat harus mulai diwacanakan dan dilaksanakan.
- Memperkuat kelembagaan kelompok tani hutan rakyat melalui program pemberdayaan menuju kelompok tani hutan rakyat yang mandiri.



Gambar 4. 39 Peta zonasi kawasan hutan sekotong

